

BAB III PEMBAHASAN

BAB III atau bab pembahasan, merupakan bab yang menyajikan hasil analisis berdasarkan pada data-data yang didapat melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis mengenai evaluasi program desa tangguh bencana di Desa Srimartani tahun 2017-2018 ini merujuk pada teori Daniel Stufflebeam tentang evaluasi program. Daniel Stufflebeam menilai sebuah program melalui 4 dimensi atau indikator yaitu *context*, *input*, *process*, dan *product*. Sedangkan parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program desa tangguh bencana, merujuk pada kriteria umum desa tangguh bencana berdasarkan Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012. Penilaian secara komprehensif terhadap ke empat indikator evaluasi tersebut diharapkan dapat menunjukkan letak kelebihan dan kekurangan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani yang bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan program.

3.1 *Context*

Context dalam evaluasi program menurut Daniel Stufflebeam (Muryadi, 2017; Mahmudi, 2011) bertujuan untuk menilai lingkungan program atau aspek-aspek yang melatar belakangi program. Parameter untuk indikator *context* pada evaluasi program desa tangguh bencana di Desa Srimartani diantaranya adalah latar belakang program dan tujuan program desa tangguh bencana. Berdasarkan parameter tersebut maka dapat dianalisis apakah tujuan program desa tangguh

bencana di Desa Srimartani telah sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu bencana di Desa Srimartani.

3.1.1 Latar Belakang Program Desa Tangguh Bencana di Desa Srimartani

Terdapat 3 hal yang melatar belakangi pembentukan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani berdasarkan hasil wawancara dengan Budianto selaku Staff Sie Pencegahan dan Kesiapisagaan BPBD Bantul pada 3 Mei 2019, yaitu :

a. Potensi Ancaman Bencana di Desa Srimartani

BPBD Bantul bersama Desa Srimartani telah melakukan kajian risiko bencana pada November 2017, saat masa pembentukan desa tangguh bencana. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan dua aspek yaitu kondisi wilayah dan riwayat kejadian bencana di Desa Srimartani. Hasil kajian menunjukkan bahwa Desa Srimartani memiliki ancaman bencana yang kompleks, karena terdapat 6 jenis potensi ancaman bencana yaitu tanah longsor, banjir, gempa bumi, kebakaran lahan, angin kencang, dan erupsi (FPRB Srimartani, 2018).

Enam jenis ancaman bahaya tersebut juga dikonfirmasi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Amat Yani selaku Ketua FPRB Desa Srimartani.

“Hampir semua bencana ada kecuali tsunami, ada gempa, banjir, longsor, kebakaran sama angin kencang. Kalau erupsi kita juga terdampak walaupun tidak menjadi ancaman langsung, saat erupsi merapi di desa ini ada posko, saat kelud juga terdampak abu sampai 5 cm.” (Amat Yani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019)

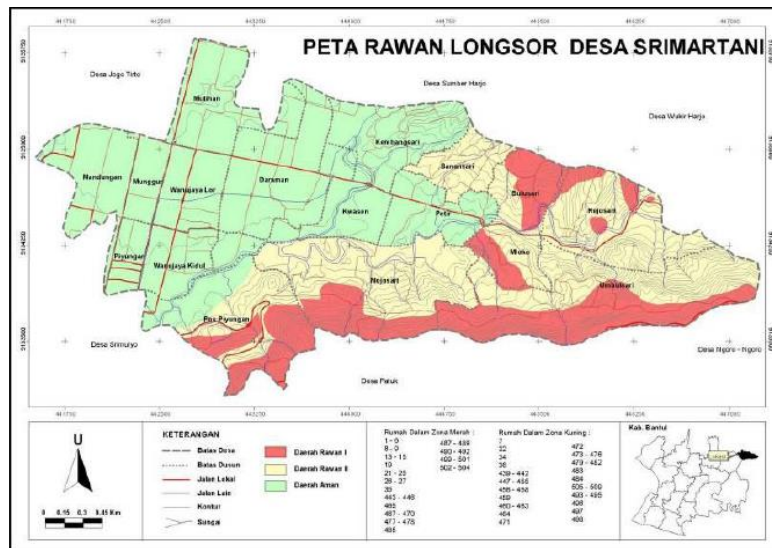
KEMUNGKINAN	5		Longsor	Angin		
	4		Kebakaran			
	3					
	2		Banjir			G. Bumi
	1	Erupsi				
	1	2	3	4	5	
	DAMPAK					

Gambar 1. Penilaian Potensi Ancaman Bencana

Sumber: Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor Desa Srimartani 2018 – 2021

Gambar di atas merupakan hasil penilaian potensi ancaman bencana di Desa Srimartani. Gambar penilaian potensi ancaman bencana di atas menunjukkan bahwa Desa Srimartani memiliki ancaman rendah terhadap potensi ancaman erupsi; memiliki ancaman sedang terhadap potensi ancaman banjir, kebakaran, gempa bumi, dan longsor; serta memiliki potensi ancaman tinggi terhadap bencana angin kencang.

Walaupun bencana tanah longsor menduduki posisi kedua sebagai bencana yang paling berpotensi setelah bencana angin kencang, dalam rakornis diputuskan bahwa pembuatan rencana kontinjensi akan difokuskan pada bencana tanah longsor. Keputusan tersebut dibuat karena bencana tanah longsor dinilai membutuhkan perhatian lebih dalam hal penanggulangan dan pemulihan dibanding dengan angin kencang (Rencana Kontinjensi Bencana Tanah Longsor Desa Srimartani 2018 - 2021).



Gambar 2. Peta Rawan Longsor Desa Srimartani

Sumber: Dokumen RPB Desa Srimartani, 2018

Terdapat total 6 dusun yang berada pada zona merah ancaman bahaya longsor yaitu Dusun Umbulsari RT 1 sampai dengan 4; Pos Piyungan RT 4, 5, dan 6; Bulusari RT 1 sampai dengan 6; Rejosari RT 2 sampai dengan 6; Kemloko RT 1 sampai dengan 4; serta Mojosari RT 1 sampai dengan 5 (FPRB Srimartani, 2018). Zona merah artinya memiliki tingkat kerawanan tinggi, zona kuning dengan tingkat kerawanan sedang, dan zona hijau dengan tingkat kerawanan rendah.

b. Riwayat Kejadian Bencana di Desa Srimartani

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa Srimartani merangkum riwayat kejadian bencana yang terjadi di Desa Srimartani pada tahun 2006 hingga awal November 2017. Sedangkan riwayat kejadian bencana yang terjadi pada pertengahan November 2017 setelah RPB dibuat hingga tahun 2018 diolah berdasarkan hasil wawancara dengan

relawan FPRB dan masyarakat. Berikut merupakan data kejadian bencana di Desa Srimartani tahun 2006-2018:

Tabel 1. Riwayat Kejadian Bencana di Desa Srimartani tahun 2006-2018

No	Tahun	Jenis Bencana dan Dampak
1	2006	Gempa Bumi Jogja
2	2010	Banjir bandang kali gawe terdampak di Dusun Pos Piyungan
3	2011	Longsor di Dusun Mojosari RT 02 menimpa rumah Bapak Zarkoni
4	2012	a. Longsor di Dusun Rejosari dekat rumah Bapak Tarno b. Longsor di Dusun Kemloko belakang rumah Bapak Bejo
5	2014	a. Abu Vulkanik Gunung Kelud b. Longsor di Dusun Kemloko menimpa rumah sebelah barat Bapak Adnan
6	2015	a. Longsor di Dusun Sanansari menimpa pos kamling b. Longsor di Dusun Bulusari menimpa tiang listrik dan rumah c. Longsor di Dusun Rejosari menimpa jalan dusun
7	2016	a. Angin kencang di Dusun Rejosari pohon tumbang menimpa rumah dan kandang ayam b. Tanah longsor di Dusun Kemloko menimpa rumah Bapak Subekti c. Kebakaran lahan di Dusun Pos Piyungan kawasan bukit Mangol d. Angin kencang di Dusun Sanansari, pohon menimpa rumah Bapak Sujimin RT 03 dan Bapak Slamet RT 06 e. Angin kencang bulak Kwasen, banyak pohon tumbang menimpa area persawahan f. Angin kencang Bulusari RT 05 menimpa kandang sapi g. Angin kencang Mojosari RT 03 pohon tumbang menutup akses jalan h. Angin kencang Umbulsari pohon tumbang menutup akses jalan
8	2017	a. Angin kencang Umbulsari menyebabkan pohon tumbang menimpa rumah Bpk Ratmono b. Tanah amblas Tambalan/Pos Piyungan depan rumah bpk Ngadiyono c. Angin kencang Wanujoyo lor merusak teras rumah Ratna d. Tanah longsor Rejosari menimpa 3 rumah e. Kebakaran lahan barat daya G. Cempluk

No	Tahun	Jenis Bencana dan Dampak
		<ul style="list-style-type: none"> f. Kebakaran lahan utara G. Cempluk g. Tanah longsor G. Cilik Petir menimpa rumah mbah Daroni h. Tanah longsor Tambalan depan masjid Jabal Nur i. Badai cempaka (banjir dan longsor)
9	2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Angin kencang di Dusun Mojosari RT 3 menyebabkan pohon tumbang menimpa jaringan listrik b. Angin kencang di Dusun Mojosari RT 4 menyebabkan pohon tumbang menimpa jaringan listrik c. Angin kencang di Dusun Mojosari RT 5 menyebabkan pohon tumbang menimpa jaringan listrik d. Angin kencang di Dusun Gedongan RT 1 menyebabkan pohon tumbang sehingga akses jalan tertutup e. Angin kencang di Dusun Kembang Sari RT 4 menyebabkan akses jalan tertutup f. Angin kencang di tambalan g. Longsor di Mojosari h. Longsor di Tambalan

Sumber : Diolah dari RPB Desa Srimartani dan Hasil Wawancara

Berdasarkan data di atas bencana yang paling banyak terjadi adalah bencana tanah longsor dan angin kencang yaitu sebanyak 14 kali kejadian. Hal tersebut sesuai dengan hasil kajian potensi ancaman bencana Desa Srimartani bahwa bencana angin kencang dan tanah longsor merupakan bencana yang memiliki potensi ancaman terbesar. Bencana tanah longsor dan angin kencang terjadi hampir setiap tahun saat musim hujan di beberapa dusun yang berada pada dataran tinggi dengan kondisi tanah labil.

Pada tanggal 19 Mei 2019 dilakukan observasi dengan melakukan pengamatan terhadap lokasi rawan longsor di 6 Dusun yaitu Pos Piyungan/Tambalan, Umbulsari, Bulusari, Rejosari, Kemloko, dan Mojosari serta rumah warga yang pernah terdampak. Masyarakat yang

tempat tinggalnya berada pada wilayah bahaya longsor menyampaikan mengenai longsor yang terus terjadi setiap musim penghujan.

“Longsor sudah 3 kali, 2017, 2018, 2019 tiap tahun tiap musim hujan udah 3 tahun ini berturut-turut. 2019 ini sampai menjebolkan tembok kamar sampai sekarang belum dibetulin.” (Ngadiran warga RT 5 Dusun Tambalan, Hasil Wawancara, 19 Mei 2019)



Gambar 3. Lokasi Rawan Longsor di Dusun Tambalan

Sumber : Hasil observasi



Gambar 4. Rumah Warga terkena Longsor di RT 5 Dusun Tambalan
Sumber : Hasil observasi

“Bencana longsor 2 kali, yang pertama itu pas badai cempaka itu 2018 depan rumah saya ini longsor setelah saya bangun longsor lagi 2019 ini.” (Solihin warga RT 2 Dusun Mojosari, Hasil Wawancara, 19 Mei 2019)



Gambar 5. Lokasi longsor di RT 2 Dusun Mojosari

Sumber : Hasil Observasi

“Kejadian 1 kali waktu badai cempaka, kena dinding belakang rumah. Semua ini 11 meter ke samping itu dinding rubuh semua.” (Choirudin warga RT 5 Dusun Bulusari, Hasil Wawancara, 19 Mei 2019)



Gambar 6. Lokasi rawan longsor di RT 5 Dusun Bulusari

Sumber : Hasil Observasi

“Peng pindo, seng pertama pas anu pas ajeng nikahe anak kula agus seng nomer loro pas yudi nyuwun terpal. Pun setahun lebih mabak, depan rumah mpun do retak niki kan mpun angkat pondasi niki mpun retak. Kuwatir ku nek niki telas deke pundi omah e.” (Tukijan warga Dusun Kemloko, Hasil Wawancara, 19 Mei 2019).



Gambar 7. Lokasi Longsor di Dusun Kemloko

Sumber : Hasil Observasi

c. Kesiapan Desa Srimartani dalam Menjalankan Program Destana

Selain faktor potensi ancaman bencana dan riwayat kejadian bencana, faktor lain yang mempengaruhi pembentukan program destana di Desa Srimartani adalah kesiapan dari pemerintah desa dan relawan FPRB Desa Srimartani. Pembentukan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani merupakan inisiasi dari pihak BPBD dan juga pihak Desa Srimartani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amat Yani Ketua FPRB Desa Srimartani, disampaikan bahwa inisiasi pembentukan destana di Desa Srimartani itu “saling” artinya baik pihak BPBD dan Desa Srimartani keduanya berperan aktif dalam proses pembentukan destana. BPBD selaku penanggung jawab program destana di level daerah harus menentukan titik mana yang akan dijadikan destana. Sedangkan desa dan FPRB membutuhkan dukungan dari BPBD untuk melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana (Amat Yani Ketua FPRB Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019).

Kesiapan pemerintah desa dan FPRB terbentuk melalui proses yang cukup panjang dimulai dari tahun 2010 saat Desa Srimartani memiliki Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB).

“Pada tahun 2010 di Desa Srimartani ada Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB) sebuah program yang diinisiasi oleh *Java Recovery Fund* (JRF). Setelah OPRB dibentuk ada banyak kejadian yang melibatkan anggota OPRB seperti saat erupsi merapi. Setelah program dari JRF selesai kemudian pada tahun 2012 dibentuk FPRB.” (Amat Yani, Ketua FPRB Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019)

Jadi jauh sebelum program destana dibentuk, Desa Srimartani telah memiliki organisasi yang bergerak pada pengurangan risiko bencana. Pada tahun 2010-2012 bernama Organisasi Pengurangan Risiko Bencana (OPRB) yang diinisiasi oleh *Java Recovery Fund* (JRF). Pada tahun 2012 program dari JRF selesai kemudian dibentuk FPRB. Amat Yani selaku Ketua FPRB Srimartani dan Agus Totok selaku perangkat Desa Srimartani merupakan dua orang tokoh yang berperan banyak dalam usaha pembentukan FPRB dan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana di Desa Srimartani.

FPRB menjadi tempat bagi masyarakat khususnya relawan untuk berpartisipasi pada kegiatan kebencanaan, baik pengurangan risiko maupun kegiatan tanggap darurat seperti saat erupsi merapi. Relawan Desa Srimartani tidak hanya aktif pada level desa tapi juga aktif di tingkat kecamatan dan kabupaten.

“Karena temen-temen penggiat kebencanaan Desa Srimartani aktif di level selanjutnya di tingkat kecamatan dan kabupaten akhirnya setelah diskusi Desa Srimartani dapat jatah destana di tahun 2017. Pada saat itu di Bantul sudah ada lebih dari 15 desa yang destana.” (Amat Yani, Ketua FPRB Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019)

Pembentukan desa tangguh bencana di Desa Srimartani dilaksanakan pada November 2017, melalui rapat koordinasi teknis (rakornis) antara fasilitator dari BPBD Kabupaten Bantul dengan pemerintah Desa Srimartani dan FPRB Desa Srimartani. Rakornis dilaksanakan sebanyak 15 kali pertemuan dengan membahas kajian risiko

bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana kontinjensi longsor, hingga pemberian materi kepada relawan FPRB. Hasil rakornis di dokumentasikan dalam bentuk dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Kontinjensi Bencana Longsor Desa Srimartani 2018-2021. Setelah rakornis, kemudian dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai program destana kepada masyarakat Desa Srimartani. Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 2 kali. Sosialisasi dihadiri perangkat desa, relawan FPRB, dan masyarakat dari perwakilan dusun.

Proses rakornis juga mengalami beberapa kendala yang disampaikan oleh Paksi Lingga selaku Sekretaris FPRB Desa Srimartani melalui wawancara pada 22 Mei 2019. Beberapa kendala dalam pertemuan tersebut adalah waktu pelaksanaan yang mundur tidak sesuai jam pada undangan dan partisipasi peserta rapat yang terus menurun.

3.1.2 Tujuan Program Desa Tangguh Bencana di Desa Srimartani

Staff Sie Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul Budianto dalam wawancara pada 3 Mei 2019 menyampaikan bahwa tujuan akhir dari program destana adalah menyiapkan desa secara mandiri menjadi desa yang tangguh baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat. Kategori tangguh diantaranya adalah adanya pedoman pelaksanaan program desa tangguh bencana berupa dokumen perencanaan, adanya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat baik berupa pengetahuan dan ketrampilan, serta secara infrastruktur dan sarana prasarana pihak

pemerintah desa menanggarkan untuk perbaikan infrastruktur vital dan pengadaan peralatan penanggulangan bencana.

Sedangkan tujuan destana menurut Amat Yani Ketua FPRB Desa Srimartani pada wawancara tanggal 2 Mei 2019 menyampaikan bahwa inti dari program destana adalah membangun sebuah kapasitas masyarakat.

“Ada rumus risiko bencana itu bisa dikurangi apabila kapasitas masyarakat dan relawan dinaikkan sementara kerentanan juga dikurangi. Yang bisa kita dilakukan adalah meningkatkan kapasitas, kalau kerentanan itu sulit. Sehingga kapasitas yang coba kita angkat.” (Amat Yani Ketua FPRB Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019)

Jadi tujuan dari program destana adalah terciptanya kemandirian desa yang dapat dibangun melalui peningkatan kapasitas. Tujuan kemandirian yang ingin dicapai menurut Amat Yani adalah masyarakat paham tentang bencana, sadar bahwa mereka berada di kawasan rawan, masyarakat menjadi waspada bisa melihat tanda-tanda, ketika ada tanda-tanda masyarakat tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian saat ada kejadian bisa melakukan upaya penanggulangan secara mandiri tidak tergantung relawan dan pemerintah. Setelah terjadi bencana masyarakat dapat bangkit.

Tujuan kegiatan destana yang disampaikan ketua FPRB Srimartani sesuai dengan pendapat C.M Shreve dan I. Kelman dalam (IIR dan Give 2 Asia, 2017) yang mengatakan bahwa cara yang paling efisien untuk menghilangkan dampak negatif bencana adalah melalui investasi dalam upaya membangun ketahanan masyarakat dan program pengurangan risiko

bencana. Program destana di Desa Srimartani merupakan program pengurangan risiko bencana, dengan fokus melaksanakan kegiatan peningkatan masyarakat dan relawan yang berfungsi untuk membangun ketahanan atau ketangguhan masyarakat. Jadi tujuan program destana di Desa Srimartani dinilai telah tepat.

Indikator context bertujuan untuk menilai aspek yang melatar belakangi dibentuknya program destana di Desa Srimartani dan menilai sejauh mana tujuan program destana telah sesuai untuk dapat menyelesaikan permasalahan risiko ancaman bencana yang ada. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hal yang melatar belakangi pembentukan program destana di Desa Srimartani yaitu : Desa Srimartani memiliki enam jenis potensi ancaman bencana, setiap tahun terjadi bencana longsor di Desa Srimartani, serta pemerintah desa, FPRB, dan masyarakat dinilai telah siap untuk menjalankan program destana. Sedangkan tujuan program destana adalah menciptakan kemandirian desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan relawan FPRB. Tujuan tersebut dinilai sesuai untuk menyelesaikan permasalahan risiko ancaman bencana yang ada, karena apabila kapasitas baik pengetahuan maupun ketrampilan meningkat maka masyarakat akan siap menghadapi bencana.

3.2 *Input*

Input dalam evaluasi program Daniel Stufflebeam bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya dan strategi telah disiapkan untuk keberlangsungan program, karena kualitas input sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

program. Parameter untuk indikator input pada evaluasi program desa tangguh bencana di Desa Srimartani diantaranya yaitu: *Pertama*, sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sumber dana untuk program desa tangguh bencana. *Kedua*, strategi yang terdiri dari serangkaian dokumen yaitu peraturan desa tentang penanggulangan bencana, dokumen kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana kontinjensi, rencana aksi komunitas, adanya integrasi antara RPB dengan RPJM dan RKP desa, serta adanya kerjasama dengan pihak luar dalam kegiatan destana.

Berdasarkan setiap parameter pada indikator sumber daya dan strategi tersebut maka dapat dianalisis apakah input untuk program destana di Desa Srimartani sudah dipersiapkan secara maksimal atau belum. Pada parameter mana yang dinilai sudah maksimal dan pada parameter mana dinilai belum maksimal. Input atau masukan tersebut akan mempengaruhi keberhasilan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani.

3.2.1 Sumber Daya Program Destana di Desa Srimartani

a. Sumber Daya Manusia dalam Program Destana di Desa Srimartani

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan program destana. Kualitas dan daya dukung sumber daya manusia dalam menjalankan program destana berpengaruh terhadap tercapainya tujuan destana. Pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Budianto selaku Staff Sie Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bantul dan Amat Yani selaku Ketua FPRB Desa Srimartani, disampaikan bahwa pelaksanaan program destana melibatkan beberapa lembaga dan juga masyarakat yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda. Berikut pemangku kepentingan dalam program destana di Desa Srimartani pada tahun 2017 dan 2018 :



Gambar 8. Stakeholders dalam Program Destana di Desa Srimartani

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

1) BPBD Kabupaten Bantul

BPBD Kabupaten Bantul merupakan instansi pemerintah yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana. Program destana merupakan program nasional yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Kepala BNPB, sehingga penanggung jawab program destana adalah BNPB dan pada level daerah adalah BPBD. Pada struktur organisasi

BPBD Kabupaten Bantul, bidang yang bertanggung jawab terhadap program destana adalah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan (Website BPBD Bantul, 2019)

Fungsi atau peran BPBD Bantul, khususnya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dalam program destana adalah sebagai fasilitator. BPBD berperan sebagai fasilitator desa tangguh bencana dimulai pada saat tahap pembentukan hingga pengembangan destana. Pada tahap pembentukan destana, BPBD sebagai fasilitator bertugas mendampingi FPRB Desa Srimartani melalui rapat koordinasi teknis yang terdiri dari 15 kali pertemuan dan 2 kali sosialisasi ke masyarakat.

Bentuk pendampingan yang dilakukan adalah melakukan kajian risiko bencana di Desa Srimartani, pembuatan dokumen rencana penanggulangan bencana, pembuatan dokumen rencana kontinjensi longsor, hingga pemberian materi kepada FPRB Desa Srimartani. Paksi Lingga selaku Sekretaris FPRB Desa Srimartani melalui wawancara pada 22 Mei 2019 menjelaskan daya dukung BPBD pada tahap pembentukan destana.

“Ada sekitar 15-18 pertemuan dan itu malem. Terus ada 2 kali sosialisasi awalnya yang datang banyak lama-lama sampai hampir habis. Kasian yang dari BPBD kalau pulang sampai jam 2 pagi undangan jam 8 malem, jam 10 malem baru mulai materi sampai jam 12. Setelah itu beres-beres sampai jam 1 atau 2 dini hari. Undangannya untuk internal anggota FPRB, kebetulan anggota FPRB banyaknya dari pamong desa dan dukuh yang bukan petugas desa sedikit, jadi yang hadir dikit karena pasti sibuk. Kalau sekarang banyak anggota yang masuk dari karangtaruna.” (Paksi Lingga, Sekretaris FPRB Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 22 Mei 2019)

Selanjutnya, pada tahap pengembangan destana peran BPBD sebagai fasilitator menurut Budianto selaku Staff Sub Bidang Kesiapsiagaan adalah menjadi narasumber dan mendampingi pada saat kegiatan destana seperti sosialisasi, pelatihan, dan simulasi. BPBD sudah beberapa kali menjadi narasumber untuk kegiatan peningkatan kapasitas di Desa Srimartani. Daya dukung BPBD dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator program desa tangguh bencana di Desa Srimartani dapat dikatakan baik.

2) Pemerintah Desa Srimartani

Pemerintah Desa Srimartani merupakan penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Srimartani. Pada struktur organisasi pemerintah Desa Srimartani, program destana berada di bawah tanggung jawab Sie Pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2017 tanggung jawab pemerintah desa dalam program desa tangguh bencana adalah sebagai berikut : *Pertama*, menyusun rencana pembangunan dan rencana kerja pemerintah desa yang memasukan unsur-unsur penanggulanagn bencana. *Kedua*, menyusun perencanaan, pedoman, dan prosedur yang berkaitan dengan penanggulanagn bencana. *Ketiga*, pengembangan dan penerpan kebijakan pengurangan risiko bencana. *Keempat*, pemaduan RPB dengan program pembangunan dan RKP desa. *Kelima*, pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBDesa sesuai kemampuan desa. *Keenam*, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah atau desa atau

pihak lain guna mendukung program. *Ketujuh*, menyerahkan seluruh potensi atau sumber daya yang ada untuk mendukung program. *Kedelapan*, membuat laporan pertanggung jawaban dana penanggulangan bencana secara akuntabel dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua FPRB dan perangkat desa, pemerintah Desa Srimartani telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan desa no 5 tahun 2017 kecuali dalam hal pembuatan laporan pertanggung jawaban dana penanggulangan bencana yang akuntabel dan trs transparan. Pemerintah Desa telah memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan dan rencana kerja, selain itu juga telah mengalokasikan anggaran APBDesa Srimartani untuk kegiatan destana.

3) Masyarakat Desa Srimartani

Masyarakat Desa Srimartani memiliki peran penting dalam program destana. Saat bencana terjadi masyarakatlah yang pertama kali dapat merasakan dampaknya dan juga yang pertama kali dapat mengambil tindakan. Sehingga masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana. Pemerintah desa dan FPRB Srimartani melakukan kegiatan peningkatan kapasitas untuk mendorong partisipasi masyarakat. Peran yang telah dilakukan masyarakat dalam program destana tahun 2017 dan 2018 adalah berpartisipasi dalam

kegiatan peningkatan kapasitas, membantu dalam penanganan saat terjadi bencana, atau ikut bergabung dalam FPRB Desa Srimartani.

4) FPRB Desa Srimartani

Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Desa Srimartani merupakan lembaga di tingkat desa yang menjadi penanggung jawab utama atau pelaku utama kegiatan program desa tangguh bencana. Keanggota relawan FPRB berjumlah 59 orang yang terdiri dari unsur perangkat desa, unsur pemuda, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat. Peran FPRB adalah menyusun rencana penanggulangan bencana desa, melakukan pengarusutamaan risiko bencana bagi seluruh pemangku kepentingan, melakukan sosialisasi kesadaran, kesiapsiagaan, kepada masyarakat dalam menghadapi bencana, serta ikut serta mengawasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Kualitas relawan FPRB akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan hasil dari program destana. Maka dari itu seluruh proses manajemen sumber daya manusia di FPRB sangat penting mulai dari perekrutan relawan, penempatan dan pembagian tugas relawan di setiap sektor, hingga pertemuan rutin dan peningkatan kapasitas relawan semuanya akan berpengaruh terhadap kualitas relawan FPRB.

Pertama, proses perekrutan relawan FPRB Desa Srimartani terbilang mudah karena calon relawan tidak perlu melewati prosedur tertentu dan tidak memiliki persyaratan khusus. Berdasarkan hasil wawancara dengan

anggota FPRB Desa Srimartani mengenai proses perekrutan relawan disampaikan bahwa :

“Kalau mau ikut ya udah ikut gabung nanti tak masukin grup nanti dapet seragam kalo pas pembuatan, kalo gak ya dipinjem yang udah punya. Tinggal ngikutin ada acara apa selanjutnya, saya tinggal ngaish tau ke pak yani si ini ikut.” (Paksi Lingga selaku Sekretaris FPRB Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 23 Mei 2019)

“Kalau di Srimartani tidak mengharuskan memiliki ketrampilan ini itu enggak, jadi dari kerelaan hati masing-masing. Jadi kita nanti belajar bareng-bareng, karena semakin banyak anggota kalau ada bencana lebih enak nanti bisa bagi tugas.” (Pujianto selaku anggota FPRB Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas disampaikan bahwa masyarakat Desa Srimartani yang ingin bergabung menjadi relawan FPRB cukup menghubungi anggota FPRB. Seluruh masyarakat Desa Srimartani memiliki kesempatan untuk bergabung di FPRB tanpa memerlukan kompetensi khusus, syarat yang diperlukan hanya kerelaan hati dan komitmen. Selanjutnya pengetahuan dan ketrampilan mengenai kebencanaan yang harus dimiliki relawan akan diberikan melalui kegiatan peningkatan kapasitas.

Kedua, penempatan dan pembagian tugas relawan di setiap sektor. Relawan FPRB Desa Srimartani dibagi ke dalam 7 sektor. Penempatan ini bertujuan supaya seluruh tugas relawan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Setiap sektor akan mendapatkan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik pada saat tanggap darurat maupun pemulihan. Berikut merupakan tugas relawan FPRB pada saat masa tanggap darurat:

Tabel 2. Tugas Relawan Desa Srimartani pada Masa Darurat

No	Sektor/ Bidang	Tugas saat Masa Darurat
1.	SAR dan Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantau tanda-tanda ancaman longsor b. Memberikan peringatan dini ke masyarakat c. Mengarahkan masyarakat ke tempat yang aman/ tempat evakuasi d. Mendata dampak longsor (korban, kerusakan, kerugian) e. Koordinasi dan kerjasama dengan sektor lain dan stakeholder setempat
2.	Logistik	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendirikan tenda pengungsi dan dapur umum b. Mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak seperti makanan, pakaian, peralatan tidur, dan alat mandi
3.	Dapur Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjaga kebersihan tempat serta peralatan masak dan makan di posko dapur umum. b. Membuat daftar menu makanan untuk 4 hari kedepan c. Selalu melakukan pengecekan ketersediaan bahan makanan. d. Mendistribusikan makanan 3 x 1 hari selama 4 hari berturut-turut. e. Selalu memperhatikan kandungan nutrisi serta kebersihan makanan
4.	Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjauhkan warga dari lokasi longsor (sterilisasi) b. Memblokir akses jalan ke lokasi longsor c. Memberikan pembatasan akses masuk ke lokasi longsor (orang tertentu) d. Melakukan patroli e. Membantu memantau kelancaran distribusi logistik f. Pemeriksaan secara berkala barang/peralatan di posko pengungsi
5.	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mendirikan pos komunikasi b. Koordinsi dengan sektor lain
6.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuka rumah sakit lapangan b. Penanganan dan pemeriksaan warga terdampak c. Pemeriksaan medical check up d. Koordinasi dengan sektor lain
7.	Data/ Dokumenasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat form assessment yang baku dan detail yang mencakup semua aspek

No	Sektor/ Bidang	Tugas saat Masa Darurat
		b. Melakukan assessment secara profesional dan teliti c. Mengungga data secara berkala di media sosial dan papan informasi d. Melakukan koordinasi dengan sektor lain

Sumber : Rencana Kontinjensi Desa Srimartani 2018-2021

Ketiga, pertemuan rutin dan peningkatan kapasitas relawan. Pertemuan rutin relawan FPRB Desa Srimartani dilaksanakan setiap 1 atau 2 bulan sekali dengan waktu tentatif. Pembahasan dalam pertemuan rutin terkait dengan agenda yang akan dilakukan FPRB ke depan. Jumlah relawan yang hadir dalam pertemuan rutin biasanya tidak banyak hanya sekitar 10 orang. Paksi Lingga menyampaikan bahwa:

“Jumlah total relawan yang ada di grup 59 orang, yang aktif cuma 20-25 orang, yang datang pertemuan rutin rata-rata 10 orang. Kalau pas pembagian seragam wah banyak yang datang. Kalau cuma rapat dikit apalagi pas hujan wah sepi mbak.” (Paksi Lingga selaku Sekretaris FPRB Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 23 Mei 2019)

Kegiatan peningkatan kapasitas relawan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan relawan. Kegiatan peningkatan kapasitas yang telah diikuti relwan FPRB Srimartnai diantaranya adalah pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, pelatihan evakuasi, pelatihan SAR, dan simulasi. Relawan yang hadir saat kegiatan peningkatan kapasitas juga belum maksimal hanya 20-25 orang, dari total 59 relawan.

Daya dukung FPRB dalam kegiatan destana dapat dikatakan belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya relawan yang tidak aktif. Jumlah relawan yang hadir saat pertemuan rutin hanya 10 dan ketika

kegiatan peningkatan kapasitas 20-25 orang dari total 59 relawan. Sehingga FPRB perlu untuk melakukan evaluasi, karena pada proses perekrutan relawan dikatakan bahwa setiap masyarakat dapat bergabung tanpa melalui prosedur dan persyaratan khusus karena semakin banyak jumlah relawan pembagian tugas semakin mudah. Kenyataannya banyaknya jumlah relawan yang direkrut tidak sesuai dengan jumlah relawan yang aktif. Apabila hanya 20-25 orang relawan yang hadir saat kegiatan peningkatan kapasitas maka hanya sejumlah relawan tersebut yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai.

b. Sumber Dana Program Destana di Desa Srimartani

Desa tangguh bencana di Desa Srimartani dibentuk pada November 2017, anggaran yang digunakan untuk pembentukan program desa tangguh bencana bersumber dari APBD Kabupaten Bantul. Budianto selaku staff sub bidang kesiapsiagaan BPBD Bantul menjelaskan melalui wawancara pada 3 Mei 2019 mengenai sumber pembiayaan pembentukan desa tangguh bencana dengan menyampaikan bahwa :

“Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan anggaran untuk setiap desa di Bantul yang akan melaksanakan program desa tangguh bencana. Anggaran yang dialokasikan untuk pembentukan desa tangguh bencana adalah Rp 90 juta dan didukung dana pengembangan pada tahun pertama sebesar Rp 20 juta. Selanjutnya anggaran untuk pelaksanaan program destana dikelola secara mandiri oleh pihak desa yang dialokasikan dari APBDesa.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka anggaran untuk pembentukan desa tangguh bencana bersumber dari APBD Kabupaten

Bantul sebesar Rp 90 juta dan didukung dana pengembangan sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut tidak diserahkan kepada pemerintah Desa Srimartani, tetapi dikelola langsung oleh BPBD Kabupaten Bantul. Anggaran digunakan oleh BPBD Bantul untuk melaksanakan kegiatan pendampingan pembentukan desa tangguh bencana di Desa Srimartani pada November 2017.

Staff Sub Bidang Kesiapsiagaan BPBD Bantul menyampaikan bahwa setelah pembentukan desa tangguh bencana, selanjutnya anggaran untuk kegiatan destana akan dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa yang dialokasikan dari APBDes. Maka dari itu sumber pembiayaan untuk program desatana di tahun 2017 dan 2018 tidak hanya bersumber dari APBD Bantul tetapi juga dari APBDes Srimartani. Tabel di bawah merupakan tabel yang menampilkan data mengenai jumlah dan sumber anggaran untuk kegiatan desa tangguh bencana tahun 2017 dan 2018.

Tabel 3. Anggaran Program Destana di Desa Srimartani Tahun 2017-2018 dari APBDes Srimartani

No	Tahun	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2017	a. Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Rp 90.000.000,00	APBD Kabupaten Bantul
		b. Dana pengembangan tahun pertama destana	Rp 20.000.000,00	APBD Kabupaten Bantul
		c. Pengembangan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Rp 14.125.000,00	APBDes Desa Srimartani Tahun Anggaran 2017
		Total	Rp124.125.000,00	

2	2018	a. Pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Rp 61.703.160,00	APBDes Desa Srimartani Tahun Anggaran 2018
		b. Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat (belanja tidak terduga)	Rp 16.245.342,00	
		Total	Rp 77.948.502,00	

Sumber : Diolah dari Hasil Wawancara, Peraturan Desa Srimartani No 2 Tahun 2018, dan Ringkasan APBDesa Srimartani 2017

Pada tahun 2017 anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bantul adalah Rp 90.000.000,00 untuk pembentukan dan Rp 20.000.000,00 untuk dana pengembangan. Pemerintah Desa Srimartani juga menganggarkan dana sebesar Rp 14.125.000,00 dengan rincian sebesar Rp 4.225.000,00 untuk keperluan pembentukan destana seperti konsumsi rapat dan honorarium panitia serta Rp 9.900.000 untuk keperluan pembelian peralatan.

Pemerintah Desa Srimartani pada tahun anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Desa Srimartani No 2 Tahun 2018 mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang bersumber dari APBDesa Srimartani. Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kesiapsiagaan sebesar Rp 61.703.160,00 dan anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan keadaan darurat adalah Rp 16.245.342,00. Alokasi anggaran dari APBDesa Srimartani untuk kegiatan kesiapsiagaan merupakan bentuk komitmen pemerintah desa untuk mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana. Dengan adanya anggaran dari APBDesa kegiatan destana dapat berjalan.

Pada tahun 2017 dan 2018 anggaran untuk kegiatan desa tangguh bencana di Desa Srimartani masih bergantung pada anggaran pemerintah baik pemerintah Kabupaten Bantul maupun pemerintah Desa Srimartani. Amat Yani selaku Ketua FPRB Srimartani menyampaikan melalui wawancara pada 2 Mei 2019 bahwa salah satu target ke depan adalah mendapatkan dukungan dana dari dunia usaha untuk menjalankan kegiatan desa tangguh bencana.

“Target nomor dua adalah sinergitas antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha itu bisa berjalan. Artinya bagaimana supaya kemandirian terbangun. Ketika dunia usaha bisa bermain pada level pengurangan risiko bencana maka anggaran tidak harus bergantung pada pemerintah.” (Amat Yani, Ketua FPRB Srimartani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019)

Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Peran serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Peran serta lembaga usaha dalam kegiatan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui *CSR (Corporate Social Responsibility)* atau dalam bentuk lainnya. Selain lembaga usaha sumber pendanaan kegiatan program destana juga bisa didapatkan melalui perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau individu masyarakat. Hal tersebut menjadi target pemerintah desa dan FPRB Srimartani ke depan.

c. Sarana dan Prasarana Program Destana di Desa Srimartani

Ketersedian sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor pendukung kegiatan desa tangguh bencana dapat berjalan secara maksimal. Setiap sektor di FPRB Desa Srimartani memerlukan

perlengkapan, yang digunakan baik pada saat kegiatan pelatihan maupun saat kegiatan tanggap darurat. Agus Totok selaku staff Sie Pemerintahan Desa Srimartani menyampaikan melalui wawancara pada 2 Mei 2019 bahwa pemerintah Desa Srimartani secara bertahap akan terus melengkapi peralatan FPRB.

Pemerintah desa setiap tahun menganggarkan pembelian alat menggunakan anggaran dari APBDesa. Mekanisme penganggaran peralatan dilakukan dengan cara FPRB mengajukan usulkan kepada pemerintah desa pada saat musyawarah rencana pembangunan desa, apabila mencapai kesepakatan maka akan dianggarkan dalam APBDesa Srimartani. Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.900.000,00, kemudian di tahun 2018 dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.000.000,00 untuk pembelian alat komunikasi serta Rp 28.000.000,00 untuk pembelian peralatan mesin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan relawan FPRB dan observasi terhadap peralatan relawan FPRB pada 19 Mei 2019. Inventaris peralatan FPRB Desa Srimartnai saat ini dapat dikatakan cukup untuk mendukung kinerja relawan dalam melaksanakan tugasnya. Peralatan yang ada di sekretariat FPRB cukup lengkap dan masih dalam kondisi baik. Berikut merupakan hasil dokumentasi sarana prasarana FPRB Srimartani:



Gambar 9. Sekretariat FPRB Desa Srimartani

Sumber : Hasil Observasi

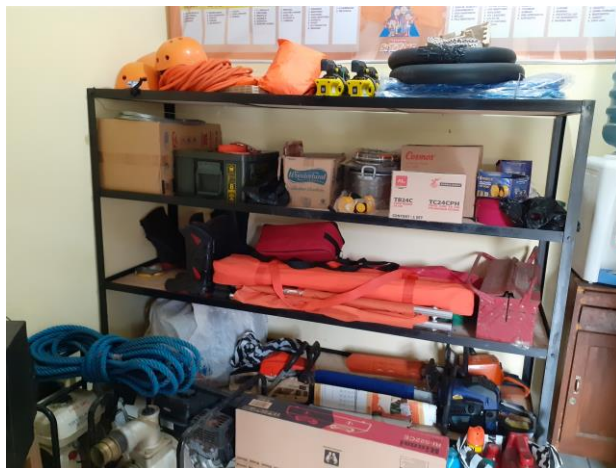
FPRB Srimartani memiliki sekretariat yang terletak di kantor pemerintah Desa Srimartani. Sekretariat tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan inventaris peralatan FPRB Srimartani. Selain itu sekretariat juga digunakan untuk kegiatan pertemuan dalam skala kecil.



Gambar 10. Peralatan Sektor Dapur Umum

Sumber : Hasil Observasi

Inventaris peralatan relawan FPRB yang ada di sekretariat terdiri dari peralatan sektor dapur umum, data dan dokumentasi, kesehatan, komunikasi, keamanan, logistik, serta SAR dan evakuasi. Gambar di atas merupakan dokumentasi foto peralatan sektor dapur umum yang terdiri dari kompor, regulator gas, peralatan masak dan peralatan makan. Kondisi peralatan sektor dapur umum cukup lengkap dan masih dalam kondisi baik. Peralatan tersebut digunakan untuk memasak saat kegiatan pelatihan dapur umum dan saat terdapat bencana yang mengharuskan masyarakat tinggal di pengungsian.



Gambar 11. Peralatan Sektor SAR dan Evakuasi

Sumber : Hasil Observasi

Gambar di atas merupakan dokumentasi foto peralatan FPRB sektor SAR dan evakuasi. Peralatan sektor SAR dan evakuasi cukup lengkap dan masih dalam kondisi baik. Rincian data inventaris peralatan FPRB Srimartani untuk seluruh sektor terdapat pada bagian lampiran,

yang diolah dari rencana kontinjensi longsor Desa Srimartani tahun 2018-2021 dan hasil observasi.

Berdasarkan peraturan Desa Srimartani Nomor 05 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana disebutkan bahwa dalam penyediaan sarana dan prasarana pemerintah desa dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi masyarakat, atau sumber lain yang sah. Agus Totok selaku perangkat desa dan relawan FPRB melalui wawancara pada 24 Juli 2019 mengkonfirmasi hal tersebut, dengan menyampaikan bahwa selain sarana atau peralatan yang merupakan inventaris desa dan FPRB Srimartani, dalam pelaksanaan kegiatan destana juga menggunakan peralatan dari masyarakat dan berbagai lembaga. Sebagian masyarakat membawa peralatan seperti HT, gergaji manual, parang, cangkul, dan berbagai peralatan lainnya. Salah satu masyarakat yaitu Didik yang merupakan Kepala Dusun Rejosari juga memiliki mobil ambulance gratis yang sering digunakan pada saat kegiatan simulasi maupun tanggap darurat.

Lembaga seperti BPBD, Puskesmas Piyungan, dan RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia) juga membawa peralatan untuk melaksanakan tugas masing-masing. Agus Totok menyampaikan bahwa BPBD membawa mobil untuk evakuasi masyarakat, Puskesmas Piyungan membawa peralatan kesehatan dan mobil ambulance, serta RAPI membawa HT, antenna, dan radio besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan destana memerlukan sinergitas dari berbagai pihak.

3.2.2 Strategi Program Destana di Desa Srimartani

Kegiatan destana tidak hanya memerlukan input berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dana tetapi juga memerlukan strategi supaya proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Rhys Price Robertson dan Ken Knight (2012) menyebutkan bahwa salah satu dari 3 elem ketahanan masyarakat adalah karakteristik prosedural masyarakat. Karakteristik prosedural masyarakat adalah masyarakat atau komunitas yang dilengkapi dengan sistem dan strategi.

Jadi pada konteks program desa tangguh bencana strategi yang diperlukan diantaranya adalah peraturan desa mengenai penanggulangan bencana; dokumen kebencanaan yang terdiri dari kajian risiko bencana, peta bencana, rencana penanggulangan bencana, rencana kontinjensi, dan rencana aksi komunitas; terintegrasinya rencana penanggulangan bencana dengan RPJM Desa dan RKP Desa; serta adanya kerjasama pemerintah desa dengan pihak ketiga dalam kegiatan kebencanaan. Pada bagian ini akan dijelaskan sejauh mana strategi program destana di Desa Srimartani telah disiapkan.

a. Peraturan Desa Srimartani tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana telah ditetapkan pada tanggal 7 Agustus 2017. Peraturan tersebut mengatur beberapa hal mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana di Desa Srimartani yaitu:

peran, hak, dan kewajiban pemerintah desa, masyarakat, dan organisasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana; kelembagaan desa tangguh bencana; tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana; pendanaan, penggunaan dana, dan pengelolaan bantuan; pengawasan dan laporan pertanggung jawaban; serta penyelesaian sengketa dan gugatan. Peraturan Desa Srimartani tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana ini telah digunakan sebagai landasan atau pedoman bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana.

b. Dokumen Perencanaan Kebencanaan di Desa Srimartani

Dokumen perencanaan kebencanaan terdiri dari dokumen kajian dan peta risiko bencana, rencana penanggulangan bencana (RPB), rencana kontinjensi (Renkon), dan rencana aksi komunitas (RAK). Seluruh dokumen perencanaan tersebut merupakan dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan destana. Berikut merupakan dokumen perencanaan kebencanaan yang sudah ada di Desa Srimartani.

Tabel 4. Dokumen Perencanaan Kebencanaan di Desa Srimartani

No	Dokumen	Ketersediaan	Masa berlaku dokumen
1	Kajian risiko bencana (ancaman, kerentanan, dan kapasitas) dan peta risiko bencana	Ada, disusun pada November 2017	5 tahun 2018-2022
2	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Ada, disusun pada November 2017	5 tahun 2018-2022
3	Rencana Aksi Komunitas (RAK)	Belum disusun	-

4	Rencana Kontinjensi (Renkon)	Ada, disusun pada November 2017. Baru rencana kontinjensi untuk bencana tanah longsor	4 tahun 2018-2021
---	------------------------------	---	-------------------

Sumber : Diolah berdasarkan hasil wawancara, dokumen RPB, dan dokumen Renkon

Pertama, dokumen kajian risiko bencana. Kajian risiko bencana merupakan dokumen yang berisi hasil kajian ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang ada di Desa Srimartani. Hasil kajian risiko bencana di Desa Srimartani dimuat dalam dokumen RPB pada BAB II yaitu penilaian risiko bencana. Hasil kajian pada dokumen ini telah digunakan sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan strategi dalam rencana penanggulangan bencana Desa Srimartani dan rencana kontinjensi untuk bencana longsor Desa Srimartani.

Kedua, dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB). Dokumen RPB merupakan dokumen yang berisi kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang dimulai dari kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan untuk ke enam jenis bencana yang ada di Desa Srimartani. Selain itu RPB juga berisi rencana koordinasi lintas lembaga pada pelaksanaan penanggulangan bencana. Dokumen RPB berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dan akan ditinjau secara berkala setiap 2 tahun.

Isi startegi dalam dokumen ini berfungsi sebagai landasan dalam penyusunan program pemerintah desa yang perkaitan dengan penanggulangan bencana. Pada rencana kerja pemerintah Desa Srimartani

tahun 2017 dan 2018, terdapat kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat yang telah terlaksana sesuai dengan strategi kesiapsiagaan pada dokumen RPB.

Ketiga, dokumen rencana aksi komunitas (RAK). RAK merupakan sebuah dokumen rencana kegiatan pengurangan risiko bencana. Kegiatan pengurangan risiko bencana dapat berupa kegiatan peningkatan pengetahuan, ketrampilan, maupun penataan lingkungan fisik supaya risiko bencana dapat dikurangi. Dokumen RAK terdiri dari rencana yang detail mengenai deskripsi kegiatan, waktu, lokasi, pelaku, anggaran, dan sumber dana.

Desa Srimartani belum memiliki dokumen RAK. Dokumen RAK belum disusun karena keterbatasan waktu pada saat rakornis. Dokumen perencanaan kebencanaan seperti kajian risiko bencana, RPB, dan rencana kontinjensi longsor merupakan output dari kegiatan rakornis antara BPBD Bantul dan Desa Srimartani saat pembentukan destana pada Noveber 2017. Melihat dari fungsinya ketiga dokumen tersebut lebih diprioritaskan dibanding RAK.

Keempat, dokumen rencana kontinjensi. Rencana kontinjensi adalah dokumen rencana atau skenario kegiatan tanggap darurat. Rencana kontinjensi menjelaskan secara rinci sampai kepada persoalan teknis tanggap darurat seperti apa yang perlu dilakukan, siapa yang melakukan,

serta sumber daya apa yang dibutuhkan. Tujuan dari rencana kontinjensi adalah supaya masyarakat dapat menyelamatkan diri.

Desa Srimartani sudah memiliki rencana kontinjensi, tetapi dari 6 jenis ancaman bencana yang ada baru terdapat rencana kontinjensi bencana tanah longsor. Rencana kontinjensi tanah longsor menjadi prioritas karena longsor dan angin kencang terjadi setiap tahun, tetapi dampak dari longsor lebih berat. Rencana kontinjensi longsor Desa Srimartani tahun 2018-2021 telah dipraktikkan dalam kegiatan simulasi bencana longsor di Dusun Sanansari, Bulusari, dan Tambalan. Kegiatan simulasi tersebut berjalan sesuai dengan strategi pada rencana kontinjensi.

c. Integrasi RPB dan RAK ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa

Integrasi atau pepaduan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), merupakan bukti bahwa kegiatan penanggulangan bencana menjadi salah satu agenda pembangunan desa yang diprioritaskan. RPB berisi kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang dimulai dari kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan. Sedangkan RAK berisi rencana kegiatan pengurangan risiko bencana. Apabila RPJMDesa dan RKPDesa Srimartani memuat rencana kegiatan penanggulangan bencana maka pemerintah desa mendukung kegiatan tersebut dengan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBDesa Srimartani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus Totok selaku perangkat Desa Srimartani beliau menyampaikan bahwa :

“Program destana sudah terintegrasi dengan RPJMDes. RPJMDes yang dulu masuk diperubahan. Kalau yang saat ini kan tahun 2019 jadi memang sudah ada kegiatan pengurangan risiko bencana, tanggap darurat.” (Agus Totok, Staff Sie Pemerintahan Desa Srimartani, Hasil wawancara, 2 Mei 2019)

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa RPJM Desa Srimartani tahun 2012-2018 belum terintegrasi dengan RPB dan RAK pada awalnya, sebelum akhirnya dilakukan perubahan. Hal tersebut dikarenakan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani baru dibentuk pada November 2017. Sedangkan untuk RPJM Desa Srimartani tahun 2019-2024 telah terintegrasi dengan rencana penanggulangan bencana.

Dokumen hasil pengkajian ulang RPJMDesa Srimartani tahun 2012-2018 yang dilakukan pada tahun 2018 ternyata juga belum memuat rencana kegiatan penanggulangan bencana. Hasil pengkajian ulang tersebut tidak memuat kegiatan penanggulangan bencana ke dalam prioritas program pembangunan maupun rencana pembangunan Desa Srimartani (RPJM Desa Srimartani, 2018).

Selain RPJM Desa Srimartani integrasi kegiatan penanggulangan bencana juga seharusnya dilakukan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Srimartani. Pada dokumen RKP Desa Srimartani tahun 2017 pemerintah Desa Srimartani telah memuat rencana pembangunan yang mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Pada

rencana belanja bidang pembinaan masyarakat terdapat anggaran untuk fasilitasi pembinaan desa tangguh. APBDesa Srimartani tahun anggaran 2017 juga menganggarkan dana untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat sebesar Rp 14.125.000,00,. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penanggulangan bencana khususnya pengembangan kesiapsiagaan masyarakat merupakan salah satu rencana pembangunan di Desa Srimartani pada tahun 2017.

Sedangkan file dokumen RKP Pemerintah Desa Srimartani Tahun 2018 yang telah disusun tidak ditemukan oleh perangkat desa bagian perencanaan. Tetapi dalam APBDesa Srimartani tahun anggaran 2018 juga terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat dan kegiatan penanggulangan keadaan darurat. Sehingga kegiatan penanggulangan bencana juga sudah terintegrasi dengan RKP Desa Srimartani tahun 2018.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanggulangan bencana khususnya pengembangan kesiapsiagaan masyarakat telah menjadi salah satu program pembangunan pemerintah Desa Srimartani yang dibuktikan dengan RKP Desa Srimartani tahun 2017 dan APBDesa Srimartani 2018. Tetapi karena Desa Srimartani belum memiliki dokumen Rencana Aksi Komunitas (RAK) yang berisi rencana kegiatan pengurangan risiko bencana maka dalam RKP 2017 dan APBDes 2018 hanya disebutkan secara umum mengenai kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat tanpa ada rincian lebih detail.

d. Kerjasama antara Pemerintah Desa Srimartani dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan program destana

Kerjasama antara pemerintah Desa Srimartani dengan pihak ketiga baik itu swasta, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi maupun organisasi lainya dalam pengurangan risiko bencana merupakan sebuah upaya untuk mendukung pelaksanaan program destana. Pemerintah Desa Srimartani dalam pelaksanaan program destana memiliki kapasitas yang terbatas dalam beberapa hal, sehingga kerjasama dengan pihak ke tiga menjadi sebuah solusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan relawan FPRB mengenai kerjasama dalam pelaksanaan program destana di Desa Srimartani tahun 2017 dan 2018 disampaikan bahwa:

“Kerjasama dengan lembaga lain, kita mirta dengan RAPI kita dorong untuk fokus dalam bidang informasi dan komunikasi. PMI kita lebih ke kerjasama untuk peningkatan kapasitas relawan. Puskesmas sudah melekat saat simulasi puskesmas kita libatkan, termasuk musbikam karena teman-teman dari koramil dan polsek juga aktif dikegiatan kita malah ada yang ikut jadi anggota. Anggota FPRB ada yang anggota tagana otomatis kerjasama dengan Dinas Sosial juga walaupun tanpa MoU. Kalau sekarang dengan BPBD otomatis karena program destana, kalau dulu dengan JRF tapi sekarang sudah selesai.” (Amat Yani, Ketua FPRB Srimartani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019)

Hasil wawancara di atas menyebutkan bahwa Pemerintah Desa Srimartani telah menjalin kerjasama dalam pelaksanaan program destana tahun 2017 dan 2018 lalu. Beberapa organisasi atau lembaga yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa Srimartani diantaranya : *Pertama*, organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kecamatan Piyungan. FPRB Desa Srimartani bekerjasama dengan RAPI Piyungan

untuk keperluan komunikasi dan informasi. Bentuk kerjasama yang dijalin adalah penggunaan jalur komunikasi radio resmi milik RAPI untuk keperluan komunikasi relawan FPRB Srimartani yang menggunakan *handy talkie* (ht) saat kejadian bencana. *Kedua*, Palang Merah Indonesia (PMI). Pemerintah Desa Srimartani bekerjasama dengan PMI dalam peningkatan kapasitas relawan. PMI menjadi pemateri pada saat kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk relawan FPRB Srimartani, seperti kegiatan pelatihan pertolongan pertama gawat darurat (ppgd). *Ketiga*, Puskesmas Piyungan yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Desa Srimartani untuk keperluan tenaga kesehatan pada saat kegiatan simulasi bencana dan keadaan darurat. *Keempat*, kepolisian dan koramil yang ikut berpartisipasi menjaga keamanan dalam pelaksanaan kegiatan simulasi dan tanggap darurat di Desa Srimartani.

Kerjasama dengan berbagai pihak di atas merupakan upaya Pemerintah Desa Srimartani dan FPRB Srimartani dalam memaksimalkan pelaksanaan kegiatan destana. Pada tahun 2017 dan 2018 belum terdapat kerjasama dengan dunia usaha dalam kegiatan program destana, sehingga kerjasama dengan dunia usaha menjadi salah satu target ke depan. Amat Yani menyampaikan bahwa apabila dunia usaha dapat bekerjasama untuk pengurangan risiko bencana maka anggaran tidak harus bergantung pada pemerintah

Pada indikator input dapat disimpulkan bahwa sumber daya dan strategi untuk pelaksanaan kegiatan destana telah dipersiapkan dengan baik. Pada parameter sumber daya yaitu : *Pertama*, pada parameter sumber daya manusia telah dibentuk kelembagaan berupa FPRB Srimartani yang menjadi pelaksana utama kegiatan destana. Selain itu BPBD Bantul, Pemerintah Desa Srimartani, dan masyarakat juga telah melaksanakan perannya dalam kegiatan destana. *Kedua*, sarana prasarana inventaris FPRB dan pinjaman dari lembaga serta masyarakat telah cukup mendukung kinerja relawan. *Ketiga*, terdapat alokasi anggaran dari APBD Bantul dan APBDesa Srimartani untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan. Sedangkan untuk parameter strategi telah ditetapkan peraturan desa nomor 5 tahun 2017 yang mengatur tentang penanggulangan bencana di Desa Srimartani, telah disusun dokumen RPB dan rencana kontinjensi longsor, kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat terdapat dalam RKP 2017 dan 2018, serta pemerintah Desa Srimartani telah menjalin kerjasama dengan RAPI, PMI, Puskesmas Piyungan, kepolisian, dan koramil untuk kelancaran kegiatan program destana. Dokumen yang belum disusun adalah RAK dan rencana kontinjensi untuk jenis bencana selain longsor.

3.3 Process

Proses dalam evaluasi program Daniel Stufflebeam bertujuan untuk menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan atau dengan kata lain menilai bagaimana implemetasi dari sebuah perencanaan. Indikator proses pada evaluasi program destana di Desa Srimartani ini juga

bertujuan untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di Desa Srimartani serta hambatan dalam pelaksanaan program destana.

Parameter untuk indikator proses pada evaluasi program desa tangguh bencana di Desa Srimartani diantaranya yaitu: *Pertama*, parameter persiapan untuk kegiatan destana yang terdiri dari persiapan dalam kegiatan destana; adanya kerangka acuan kerja; serta tersampainya informasi mengenai kegiatan destana kepada masyarakat Desa Srimartani. *Kedua*, parameter pelaksanaan program destana yang terdiri dari adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, adanya kesesuaian antara rencana anggaran dan pengeluaran, partisipasi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta hambatan dalam pelaksanaan program destana. *Ketiga*, parameter monitoring evaluasi program destana yang terdiri dari adanya monitoring evaluasi secara berkala terhadap program, terdapat laporan mengenai hasil monev, terdapat rencana tindak lanjut berdasarkan hasil monev dan dilaksanakannya rencana tindak lanjut tersebut.

Berdasarkan setiap parameter pada indikator proses maka dapat dianalisis bagaimana proses pelaksanaan program destana di Desa Srimartani. Sudah seberapa baik implementasi program destana di Desa Srimartani. Proses pelaksanaan tentu akan mempengaruhi hasil atau keluaran dari program destana.

3.3.1 Persiapan Program Destana di Desa Srimartani

Berikut merupakan proses persiapan program destana di Desa Srimartani pada tahun 2017 dan 2018, yang dimulai dari tahap

penyampaikan usulan kegiatan saat musrenbangdes hingga penyebaran informasi kegiatan ke masyarakat :



Gambar 12 Proses persiapan program destana di Desa Srimartani
Sumber : Diolah dari hasil wawancara

Proses persiapan pelaksanaan program destana dimulai pada tahap musyawarah pembangunan desa (musrenbangdes) yang melibatkan pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan desa, hingga masyarakat. Musrenbangdes merupakan forum musyawarah di tingkat desa yang membahas rencana kerja pemerintah desa pada satu tahun ke depan. Pada musrenbangdes Srimartani tahun 2017 dan 2018 disepakati adanya kegiatan destana, yaitu dalam bentuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat. Sehingga kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat mendapatkan alokasi anggaran dari APBDesa Srimartani.

Pembahasan yang dilakukan FPRB Srimartani untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat dilakukan melalui rapat koordinasi pada pertemuan rutin relawan FPRB. Berdasarkan hasil wawancara dengan relawan FPRB disampaikan bahwa :

“Sosialisasi atau simulasi dari pak ketua dapat masukan dari luar nanti pas rapat disampaikan ada permintaan sosialisasi dan simulasi dari masyarakat. Nanti dirundingkan bersama pas rapat satu atau dua kali pertemuan sudah jadi.” (Puji, relawan FPRB Srimartani, Hasil Wawancara, Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan relawan FPRB Srimartani disampaikan bahwa selama ini masyarakat sering kali mengajukan usulan ke FPRB melalui ketua FPRB untuk melakukan kegiatan sosialisasi atau simulasi di wilayah dusun atau sekolah. Masukan dari masyarakat tersebut dibahas dalam pertemuan rutin FPRB Srimartani. Pertemuan relawan FPRB untuk membahas persiapan kegiatan biasanya dilakukan satu hingga dua kali pertemuan.

Informasi mengenai kegiatan destana harus disampaikan kepada seluruh masyarakat. Selama ini kegiatan destana lebih sering dilaksanakan di tingkat dusun sehingga FPRB Srimartani bekerjasama dengan dusun. Masyarakat menyampaikan bahwa informasi mengenai kegiatan sosialisasi dan simulasi disampaikan ke masyarakat melalui undangan dari pihak dusun.

3.3.2 Pelaksanaan Program Destana di Desa Srimartani

a. Terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan program destana dan pelaksanaan

Rencana kegiatan program desa tangguh bencana berfungsi untuk menilai sejauh mana kegiatan destana telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan, atau bagaimana implementasinya. Rencana

kegiatan destana selama satu tahun anggaran dapat dilihat pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Srimartani. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Srimartani tahun 2017 dan 2018 menyebutkan bahwa rencana kegiatan desa tangguh bencana adalah pengembangan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tetapi dalam dokumen RKP Desa Srimartani tidak disebutkan rincian kegiatan kesiapsiagaan apa saja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Jadi, pemerintah Desa Srimartani mengalokasikan dana untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat di tahun 2017 dan 2018 tetapi untuk rincian kegiatan yang akan dilaksanakan tidak tercantum dalam RKP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan relawan FPRB Desa Srimartani disampaikan bahwa pada tahun 2017 dan 2018 FPRB Desa Srimartani memang belum memiliki rencana kegiatan tahunan untuk kegiatan destana. Paksi Lingga dan Puji menyampaikan melalui wawancara bahwa:

“Kalau yang spesifik bulan ini mau ada kegiatan apa enggak ada. Jadi kalau bikin acara kita dapat anggaran dari desa alokasi dari APBDesa berapa juta biasanya kita cuma di suruh bikin acara buat istilahnya untuk menggunakan anggaran itu biasanya peningkatan kapasitas nanti ada materi di balai desa atau mungkin nanti keluar outbond. Sama paling diminta bantuin di sekolah-sekolah sosialisasi dan simulasi bencana terus kami juga partisipasi di hari kesiapsiagaan bencana.” (Paksi Lingga, relawan FPRB Srimartani, Hasil Wawancara, Mei 2019)

“Kegiatan menjadi bahasan pada rapat rutin, belum ada musyawarah untuk perencanaan kegiatan selama satu tahun. Karena kalo pas musim hujan dijadwalkan ada agenda bisa bertabrakan dengan bencana. Sosialisasi atau simulasi dari pak ketua dapat masukan dari luar nanti

pas rapat disampaikan ada permintaan sosialisasi dan simulasi dari masyarakat. Nanti dirundingkan bersama pas rapat satu atau dua kali pertemuan sudah jadi.” (Puji, relawan FPRB Srimartani, Hasil Wawancara, Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas disampaikan oleh relawan FPRB bahwa FPRB Srimartani pada tahun 2017 dan 2018 belum memiliki rencana kegiatan untuk satu tahun. Anggaran dari Pemerintah Desa Srimartani tetap digunakan untuk kegiatan peningkatan kapasitas seperti sosialisasi dan simulasi di masyarakat serta sosialisasi dan pelatihan untuk relawan FPRB. Pembahasan mengenai rencana kegiatan dilakukan pada saat pertemuan rutin bulanan berdasarkan usulan dari internal relawan maupun dari permintaan masyarakat.

Desa Srimartani di tahun 2017 dan 2018 tidak memiliki rencana kegiatan tahunan untuk program destana dan belum memiliki RAK, sehingga penilaian bagaimana implementasi kegiatan destana di tahun 2017 dan 2018 dapat diukur menggunakan dokumen RPB.

Tabel 5. Realisasi Kegiatan Kesiapsiagaan di Desa Srimartani Tahun 2017 dan 2018

No	Bencana	Rencana Tindakan Kesiapsiagaan dalam RPB Desa Srimartani tahun 2018-2022	Pelaksanaan Kesiapsiagaan	
			2017	2018
1	Longsor	a. sosialisasi mengenai bahaya tanah longsor kepada masyarakat dan simulasi	terlaksana	terlaksana
		b. peningkatan kapasitas relawan mengenai tanah longsor dan PPGD	terlaksana	terlaksana
		c. pengadaan perlengkapan evakuasi dan komunikasi	terlaksana	terlaksana
		d. pembuatan sistem peringatan dini/ EWS	terlaksana	

No	Bencana	Rencana Tindakan Kesiapsiagaan dalam RPB Desa Srimartani tahun 2018-2022	Pelaksanaan Kesiapsiagaan	
			2017	2018
		e. pembuatan peta evakuasi		
2	Banjir	a. Sosialisai mengenai bahaya bencana banjir kepada masyarakat dan simulasi		terlaksana
		b. Sosialisasi buang sampah pada tempatnya/ pengelolaan sampah		
		c. Peningkatan kapasitas relawan dalam hal bencana banjir & water rescue		terlaksana
		d. Pengadaan perlengkapan evakuasi air dan komunikasi		
3	Kebakaran Lahan	a. Sosialisai mengenai bahaya bencana kebakaran lahan kepada masyarakat		
		b. Sosialisasi mengenai larangan membuang dan membakar sampah sembarangan		
		c. Peningkatan kapasitas relawan kebencanaan dalam hal kebakaran khususnya pemadaman api		
		d. Pengadaan peralatan pemadam kebakaran		
4	Angin Kencang	a. Sosialisasi mengenai bencana angin kencang kepada masyarakat		
		b. Peningkatan kapasitas relawan mengenai bencana angin kencang		
		c. Pengadaan perlengkapan untuk mengatasi dampak angin kencang seperti gergaji mesin dll		terlaksana

Sumber : Diolah dari RPB Desa Srimartani dan Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel realisasi kegiatan kesiapsiagaan di atas telah dilaksanakan beberapa kegiatan kesiapsiagaan untuk bencana longsor dan banjir serta pembelian peralatan. Pada tahun 2017 telah terlaksana kegiatan sosialisasi program desa ke masyarakat, pengembangan

kapasitas relawan melalui diklat pertolongan pertama gawat darurat (PPGD), dan simulasi bencana longsor di Dusun Sanansari dan Bulusari. Sedangkan pada tahun 2018 kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi dan simulasi longsor di Dusun Tambalan, simulasi banjir di Dusun Wonojoyo Kidul, serta pelatihan PPGD, *water rescue*, dan *vertical rescue*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kegiatan destana di tahun 2017 dan 2018 telah sesuai dengan rencana kesiapsiagaan dalam dokumen RPB. Tetapi kegiatan pengembangan kesiapsiagaan pada tahun 2017 baru fokus pada bencana tanah longsor, kemudian di tahun 2018 fokus pada longsor dan banjir. Sedangkan kesiapsiagaan untuk bencana kebakaran lahan, angin kencang, gempa bumi dan erupsi belum dilaksanakan. Evaluasi akan lebih mudah dilakukan apabila Desa Srimartani memiliki dokumen rencana aksi komunitas yang berisi rencana pengurangan risiko bencana dan memiliki rencana kegiatan tahunan untuk program destana. Karena dokumen RPB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan bencana 5 tahunan sehingga dalam RPB tidak ada rincian spesifik mengenai target tahunan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana.

b. Realisasi anggaran untuk kegiatan program destana

Tabel 6. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Srimartani untuk Kegiatan Program Desa Tangguh Bencana Tahun 2017 dan 2018

No	Tahun	Kegiatan	Rincian	Anggaran	Realisasi
1	2017	Pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi	Belanja makanan dan minuman rapat	Rp 3,200,000.00	Rp 3,200,000.00
			Belanja honorarium tim panitia	Rp 1,025,000.00	Rp 1,025,000.00
			Belanja modal pengadaan peralatan dan mesin	Rp 9,900,000.00	Rp 9,900,000.00
			Total	Rp14,125,000.00	Rp14,125,000.00
2	2018	Pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	Fotocopy, cetak, dan pengandaan	Rp 700,000.00	Rp 700,000.00
			Makan dan minum	Rp 8,200,000.00	Rp 8,200,000.00
			Sewa peralatan	Rp 1,175,000.00	Rp 1,175,000.00
			Bahan bakar minyak dan gas	Rp 1,782,000.00	Rp 1,782,000.00
			Honorarium tim pelaksana kegiatan	Rp 1,025,000.00	Rp 1,025,000.00
			Honorarium instruktur/ pelatih/ narasumber	Rp 800,000.00	Rp 800,000.00
			Sewa sound system dan genset	Rp 1,000,000.00	Rp 1,000,000.00
			Honor harian peserta	Rp 2,200,000.00	Rp 2,200,000.00
			Barang dan jasa lainnya	Rp 7,500,000.00	Rp 7,500,000.00
			Pengadaan alat-alat	Rp 9,000,000.00	Rp 9,000,000.00

No	Tahun	Kegiatan	Rincian	Anggaran	Realisasi
			komunikasi		
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 28,321,160.00	Rp 28,321,160.00
			Total	Rp 61,703,160.00	Rp61,703,160.00
		Kegiatan penanggulangan keadaan darurat (belanja tidak terduga)	Total	Rp 32,755,452.00	Rp14,700,000.00

Sumber : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Srimartani Tahun 2017 dan 2018

Data pada tabel di atas merupakan data laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Srimartani tahun anggaran 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 anggaran pemerintah Desa Srimartani yang disediakan untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat sebesar Rp 14,125,000.00, anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 14,125,000.00, atau 100%. Output yang dicapai berdasarkan hasil wawancara dengan relawan FPRB Srimartani adalah terlaksananya kegiatan simulasi bencana tanah longsor di Dusun Sanansari dan Bulusari, pelatihan PPGD untuk relawan FPRB, dan pembelian peralatan relawan FPRB.

Pada tahun 2018 Pemerintah Desa Srimartani kembali menganggarkan dana untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat sebesar Rp 61,703,160.00 dan anggaran bidang tidak terduga sebesar Rp 32,755,452.00 untuk kegiatan penanggulangan keadaan darurat. Anggaran untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan terealisasi sebesar Rp 61,703,160.00 atau sebesar 100%. Output yang dicapai untuk

kegiatan kesiapsiagaan berdasarkan hasil wawancara dengan relawan FPRB Srimartani adalah pembelian peralatan, sosialisasi dan simulasi longsor di Dusun Tambalan, simulasi banjir di Dusun Wonojoyo Kidul, serta pelatihan PPGD, *water rescue*, dan *vertical rescue* untuk relawan FPRB Srimartani. Sedangkan dana untuk kegiatan tanggap darurat terealisasi sebesar Rp 14,700,000.00 atau 44,88%. Berdasarkan hasil wawancara dengan relawan FPRB kegiatan tanggap darurat yang dilakukan pada 2018 lalu adalah mengatasi bencana angin kencang dan tanah longsor.

Berdasarkan laporan realisasi APBDesa Srimartani pada tabel di atas, anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat baik di tahun 2017 maupun 2018 keduanya terealisasi sebesar 100%. Walaupun secara dokumen antara yang dianggarkan dan direalisasikan itu sama, tetapi dalam proses penganggaran belum terlaksana prinsip *good governance* yaitu tidak ada akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya laporan kegiatan dan laporan keuangan untuk kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara pada 24 Juli 2019 dengan Lilik selaku Kepala Urusan Pencanaan Desa Srimartani disampaikan bahwa tidak ada laporan kegiatan dan laporan keuangan untuk kegiatan desa tangguh bencana atau kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat. Paksi Lingga selaku sekretaris FPRB juga menyampaikan bahwa selama

ini FPRB tidak membuat laporan keuangan tetapi hanya mengumpulkan nota untuk diberikan ke pemerintah desa. Tidak adanya laporan keuangan membuat publik tidak dapat mengetahui output atau capaian apa saja yang sudah didapatkan dengan realisasi anggaran yang mencapai 100%. Data mengenai output pada penjelasan di atas didapatkan melalui wawancara dengan relawan FPRB dan perangkat Desa Srimartani. Laporan keuangan penting sebagai bentuk pertanggung jawaban dan transparansi selain itu juga untuk mengukur efisiensi.

c. Partisipasi masyarakat

Masyarakat dalam program desa tangguh bencana memiliki peranan penting, karena tujuan utama program destana adalah menyiapkan desa yang mandiri dalam menanggulangi bencana melalui masyarakat yang tangguh. Peraturan desa Srimartani tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana juga mengatur mengenai kewajiban masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan destana. Pemerintah Desa Srimartani mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan dalam penanggulangan bencana melalui organisasi FPRB dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi masyarakat.

Bentuk partisipasi menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1986) dalam penelitian terdahulu (Merryana Anggriani, 2015) adalah buah pikiran,

tenaga, ketrampilan, dan harta benda. *Pertama*, bentuk partisipasi buah pikiran. Pada program destana di Desa Srimartani partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pikiran terjadi pada proses perencanaan yaitu ketika masyarakat dan relawan FPRB menyampaikan usulan kegiatan program destana pada forum musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes). Berdasarkan notulensi kegiatan musrenbang Desa Srimartani tahun 2017 untuk program pembangunan Desa Srimartani tahun 2018, terdapat usulan kegiatan bidang pembinaan masyarakat berupa pengurangan risiko bencana.

Dokumen tersebut menyebutkan usulan kegiatan yang disampaikan masyarakat adalah pembuatan dokumen RPB dan rencana kontinjensi, pelaksanaan gladi lapangan kebencanaan, dan pengadaan peralatan seperti dapur umum, P3K kebencanaan, *handy talkie*, dan *hand chain saw*. Berdasarkan aspirasi masyarakat pada forum musrenbangdes 2017, maka kegiatan pengembangan kesiapsiagaan masyarakat menjadi salah satu rencana kerja pemerintah Desa Srimartani di tahun 2018. Pada bentuk partisipasi buah pikiran, masyarakat yang menjadi relawan FPRB memiliki lebih banyak kesempatan untuk dapat menyampaikan gagasannya terkait kegiatan destana, karena relawan FPRB memiliki forum rapat rutin FPRB yang dilaksanakan setiap bulan.

Kedua, partisipasi dalam bentuk tenaga terdapat pada kegiatan simulasi bencana dan kegiatan tanggap darurat. Kegiatan simulasi yang

terlaksana di tahun 2017 dan 2018 adalah simulasi longsor di Dusun Sanansari, Bulusari, dan Tambalan serta simulasi banjir di Dusun Wanojoyo Kidul. Sedangkan kegiatan tanggap darurat yang dilakukan adalah ketika terjadi bencana angin kencang, longsor, dan badai cepaka. Partisipasi dalam bentuk tenaga di lakukan baik oleh relawan FPRB maupun masyarakat Desa Srimartani.

Tabel 7 Relawan FPRB Srimartani Perwilayah Dusun

No	Nama Dusun	Jumlah relawan FPRB
1	Mandung	6
2	Piyungan	3
3	Pos Piyungan	5
4	Wanujoyo Lor	4
5	Wanujoyo Kidul	3
6	Munggur	2
7	Mutihan	2
8	Daraman	2
9	Kwasen	3
10	Mojosari	4
11	Kembangsari	4
12	Petir	5
13	Sanansari	2
14	Bulusari	2
15	Rejosari	2
16	Kemloko	2
17	Umbulsari	8
Total		59 orang

Sumber : Hasil wawancara, 27 September 2019

Total jumlah relawan FPRB adalah 59 anggota yang terdiri dari perwakilan masyarakat di 17 dusun. Pada saat bencana terjadi pada tingkat dusun dengan skala kecil, maka cukup perwakilan relawan pada dusun tersebut beserta masyarakat yang mengatasi. Tetapi apabila memerlukan bantuan maka akan berkoordinasi dengan FPRB Srimartani.



Gambar 13 Partisipasi tenaga saat Badai Cempaka 2017

Sumber : Dokumentasi FPRB Srimartani

Gambar di atas merupakan contoh partisipasi dalam bentuk tenaga yang dilakukan oleh masyarakat dan relawan FPRB saat melakukan kerja bakti, ketika badai cempaka terjadi di tahun 2017. Sedangkan partisipasi dalam bentuk tenaga saat simulasi, dilakukan dengan cara mengikuti skenario tanggap darurat dimulai saat masyarakat harus berlari menuju titik kumpul yang aman hingga kegiatan di posko pengungsian.

Ketiga, partisipasi dalam bentuk ketrampilan dilakukan oleh relawan FPRB Srimartani. Relawan FPRB Srimartani dibagi menjadi tujuh sektor dengan ketrampilan yang berbeda-beda sesuai tugas pada sektornya. Tujuh sektor tersebut yaitu sektor SAR dan evakuasi dengan ketrampilan evakuasi, kesehatan dengan ketrampilan pertolongan pertama gawat darurat, data dan dokumentasi dengan ketrampilan pendataan awal bencana, logistik dengan ketrampilan manajemen posko dan distribusi, dapur umum dengan ketrampilan memasak, keamanan untuk

pengamanan, dan sektor komunikasi untuk berkoordinasi. Keterampilan yang dimiliki relawan dilatih pada saat kegiatan peningkatan kapasitas relawan, kemudian dipraktikkan pada saat simulasi bencana dan kegiatan tanggap darurat.



Gambar 14. Pelatihan *vertical rescue*

Sumber : Dokumentasi FPRB Srimartani, 2018

Pada tahun 2017 dan 2018, kegiatan destana yang melibatkan keterampilan relawan FPRB adalah kegiatan peningkatan kapasitas PPGD, SAR, *vertical rescue*, dan *water rescue*; kegiatan simulasi longsor dan banjir; serta kegiatan tanggap darurat bencana longsor, angin kencang, dan badai cempaka. Gambar di atas merupakan salah satu contoh partisipasi dalam bentuk keterampilan yang dilakukan relawan FPRB pada saat pelatihan *vertical rescue*. Tujuan dari pelatihan tersebut adalah meningkatkan kemampuan evakuasi pada medan sulit.

Keempat, partisipasi dalam bentuk harta benda telah dilakukan masyarakat Desa Srimartani pada saat kegiatan simulasi longsor dan banjir serta saat ada kejadian bencana. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Agus Totok selaku perangkat Desa Srimartani pada 14 Juli 2019 disebutkan bahwa masyarakat biasanya menyediakan konsumsi dan meminjamkan peralatan. Peralatan yang dibawa masyarakat pada saat kegiatan simulasi, kerja bakti, dan tanggap darurat diantaranya adalah HT, gergaji manual, parang, cangkul, hingga mobil ambulance. Sedangkan konsumsi biasanya masyarakat membawa beras dan sayur suka rela untuk dimasak di dapur umum.

Partisipasi masyarakat pada kegiatan destana di Desa Srimartani dilakukan dalam bentuk partisipasi buah pikiran, tenaga, ketrampilan, dan harta benda pada kegiatan simulasi, pelatihan, hingga tanggap darurat. Masyarakat yang ikut menjadi anggota relawan FPRB memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara lebih aktif dibanding dengan masyarakat yang tidak menjadi anggota FPRB. Karena pada bentuk partisipasi buah pikiran relawan dapat menyampaikan gagasannya pada saat rapat rutin dan untuk partisipasi ketrampilan relawan dibekali dengan ketrampilan sesuai dengan sektor masing-masing.

d. Perlindungan kelompok rentan

Prinsip pelaksanaan desa tangguh bencana berdasarkan Perka BNPB No 1 Tahun 2012 salah satunya adalah keberpihakan pada kelompok rentan. Peraturan Desa Srimartani No 5 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana juga mengatur hal tersebut. Masyarakat yang masuk dalam kategori kelompok rentan adalah difabel,

usia lanjut, bayi, balita, anak-anak, perempuan hamil, dan orang sakit. Jumlah kelompok rentan di Desa Srimartani berdasarkan data penduduk pada buku monografi Desa Srimartani tahun 2018 adalah 14 jiwa difabel, 1014 jiwa usia lanjut (usia 65 ke atas), serta 4029 jiwa usia bayi, balita, dan anak (usia 0-15 tahun). Perlakuan khusus yang seharusnya diterima kelompok rentan adalah dalam hal aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan (Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2017).

Perlindungan kelompok rentan pada pelaksanaan program destana di Desa Srimartani berdasarkan hasil wawancara pada 24 Juli 2019 dengan Agus Totok selaku staff pemerintahan dan relawan FPRB disebutkan bahwa :

“Kelompok rentan diistimewakan ketika terjadi misalnya longsor dan banjir itu yang kita dahulukan kelompok rentan, harus posisi aman ibu hamil, balita, lansia. Terlebih dahulu diungsikan ke tempat aman. Baru setelah itu nanti yang bapak-bapak dan pemuda.”

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa dalam keadaan darurat kelompok rentan dievakuasi terlebih dahulu. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil pengamatan pada video dokumentasi simulasi di Desa Srimartani. Pada video dokumentasi simulasi longsor dan banjir yang pernah dilaksanakan di Desa Srimartani terlihat lansia dan anak-anak digendong oleh relawan dan TNI untuk segera dievakuasi. Kelompok rentan perlu mendapatkan perhatian khusus terutama pada saat kondisi darurat karena secara fisik individu yang sehat dan kuat lebih mungkin bertahan dan pulih dibanding kelompok yang rentan.

e. Hambatan dalam pelaksanaan program destana

Hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan program destana berdasarkan hasil wawancara dengan tiga orang relawan FPRB adalah minimnya jumlah relawan FPRB yang hadir pada saat pertemuan rutin dan kegiatan destana. Paksi Lingga, Amat Yani, dan Puji yang ditemui secara terpisah melalui wawancara menyampaikan bahwa :

“Kadang dari anggota karena yang jelas pas ada bencana tidak bisa langsung meninggalkan tanggung jawab masing-masing. Jadi siapa yang bisa merapat ke lokasi, terjun duluan nanti sambil menunggu rekan yang lain gabung” (Puji selaku relawan FPRB Srimartani, hasil wawancara, 17 Mei 2019)

“Keanggotaan, konsistensi teman-teman di organisasi masih kurang. Rasa kerelawanannya masih sangat kurang, sekarang siapa yang mau hujan deres enaknyanya kan di rumah malah disuruh keliling mantau susahnyanya di situ. Paling yang benar-benar totalitas Pak Yani sama Pak Totok. Kalau dua orang itu gak ada, habis FPRB.” (Paksi Lingga selaku relawan FPRB Srimartani, hasil wawancara, 23 Mei 2019)

“Secara personil teman-teman mereka kan kecenderungannya pekerja, mereka kan pada bekerja. Sehingga ketika perlu ada kegiatan sifatnya adalah pertemuan atau koordinasi yang datang tidak maksimal walaupun secara kualitas tidak begitu mempengaruhi. Tapi secara kuantitas kan kalau yang datang tidak banyak kan kurang gimana gitu. Tapi saat ada kejadian kemudian kita *share* yang bekerja beberapa mereka libur datang beraprtisipasi, yang terjadi seperti itu.” (Amat Yani selaku Ketua FPRB Srimartani, hasil wawancara, 2 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas disebutkan bahwa kendala atau hambatan yang ditemui pada saat pelaksanaan program destana adalah jumlah anggota relawan FPRB yang menghadiri pertemuan rutin dan kegiatan destana masih minim. Jumlah relawan FPRB Srimartani saat ini berdasarkan jumlah anggota grup Whatsapp adalah 59 anggota, tetapi dari total jumlah anggota hanya sekitar 10 anggota yang hadir saat

pertemuan rutin dan 20-25 anggota yang aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas relawan.

Menurut Amat Yani dan Puji selaku relawan hal tersebut dikarenakan anggota relawan FPRB juga merupakan pekerja, sehingga pekerjaan mereka menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kegiatan FPRB. Berbeda dengan Paksi Lingga yang menyampaikan bahwa alasan tidak maksimalnya anggota relawan yang hadir dalam rapat dan kegiatan destana bukan hanya karena masalah pekerjaan tetapi rasa kerelawanan yang juga masih kurang.

Amat Yani menyampaikan dalam hasil wawancara bahwa minimnya jumlah relawan FPRB yang hadir tidak begitu mempengaruhi secara kualitas. Maksudnya, kegiatan tetap akan berjalan dengan baik meskipun dengan anggota terbatas. Selain permasalahan keaktifan anggota relawan, Paksi Lingga juga menyebutkan hambatan lainnya yaitu:

“Sebenarnya personil sudah cukup kompeten tapi kurang *actionnya* dalam hal tindakan di lapangan. Semuanya itu cuman angan-angan gak ada *actionnya*. Mereka dah tau bagusannya gini-gini tapi *actionnya* kurang paling cuman ketua, Pak Agus sama beberapa orang. Jadi ilmu yang didapat di destana selama ini percuma belum dipraktikan. Tapi ya udah bagus sosialisasi, peningkatan kapasitas sudah jalan. FPRB juga sudah cukup dikenal masyarakat, kalo ada apa-apa masalah bencana pasti FPRB.” (Paksi Lingga selaku relawan FPRB Srimartani, hasil wawancara, 23 Mei 2019)

Pada hasil wawancara di atas disampaikan oleh Paksi Lingga bahwa walaupun anggota FPRB sudah memiliki pengetahuan dan

ketrampilan yang cukup, tetapi masih belum banyak dipraktikan. Selain itu seperti dijelaskan sebelumnya hanya beberapa anggota saja yang aktif. Walaupun begitu kegiatan destana di Desa Srimartani sudah berjalan dan FPRB sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat Srimartani

3.3.3 Monitoring dan Evaluasi Program Destana di Desa Srimartani

a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap program destana di Desa Srimartani idealnya dilaksanakan secara rutin dan berkala oleh BPBD Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Srimartani, dan internal FPRB Desa Srimartani. Monitoring evaluasi bertujuan untuk melihat bagaimana kemajuan program destana dan bagaimana pelaksanaan program destana apakah telah sesuai dengan rencana dan prosedur yang telah ditetapkan. Temuan lapangan berdasarkan hasil wawancara dengan ketua FPRB, relawan FPRB, dan staff BPBD menunjukkan bahwa kegiatan monev terhadap program destana di Desa Srimartani belum berjalan.

Amat Yani selaku Ketua FPRB Desa Srimartani menyampaikan terkait dengan monitoring dan evaluasi program destana bahwa :

“Monitoring belum berjalan. Saya selaku di desa tangguh, instrument untuk monitoring belum punya. Seharusnya setiap tahun ada update terkait dengan destana di semua desa, destana kan ada 3 tingkat ini semua masih pratama untuk menjadi madya dan utama kan memang harus ada evaluasi. Ini mau pratama terus apa mau menjadi madya apa malah kembali ke 0 lagi kan harus dievaluasi dan ini belum dilakukan. Selama ini hanya sebatas pada pengembangan dan pengembangan tetapi tidak ada ukuran ini masuk pratama indikatornya apa madya apa itu belum dilakukan oleh BPBD.” (Amat Yani, Ketua FPRB Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Ketua FPRB Desa Srimartani dijelaskan bahwa belum ada monitoring dan evaluasi dari BPBD terhadap program destana di Desa Srimartani. Selain itu belum adanya instrument untuk menentukan tingkat destana yaitu utama, madya, dan pratama menjadi salah satu persoalan yang ada. FPRB Desa Srimartani selama ini terus melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan, tetapi hasil dari kegiatan yang telah dilakukan belum pernah dimonitoring dan evaluasi.

Menanggapi hal terkait instrumen untuk mengukur tingkat destana Staff Sub Bidang Kesiapsiagaan BPBD Bantul Budianto menyampaikan dalam wawancara pada 3 Mei 2019 bahwa instrument untuk menentukan destana masuk dalam kategori pratama, madya, atau utama sudah ada. Instrumen tersebut adalah Peraturan Kepala BNPB No 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Pada Perka BNPB dijelaskan mengenai aspek dan indikator untuk mengukur tingkat destana.

Budianto menyampaikan bahwa indikator sudah ada tetapi belum dapat diterapkan karena terdapat berbagai macam pertimbangan. Selain itu perka tersebut masih dalam kajian BNPB. Sementara ini seluruh desa di Bantul yang sudah dibentuk destana berada pada tingkat pratama, sebenarnya terdapat beberapa desa yang sudah lebih dari pratama tetapi

dalam beberapa aspek masih belum mencapai standar madya karena ada beberapa komponen yang belum terpenuhi.

Terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program destana Budianto selaku Staff Sub Bidang Kesiapsiagaan BPBD Bantul menyampaikan bahwa BPBD Bantul melakukan pemantauan melalui 2 hal:

Pertama, melalui himpunan FPRB tingkat kabupaten. Setiap desa yang sudah ditetapkan menjadi destana idealnya memiliki lembaga bernama Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB). Kabupaten Bantul memiliki himpunan FPRB di tingkat kabupaten yang menghimpun seluruh FPRB di tingkat desa, FPRB Desa Srimartani juga merupakan bagian dari himpunan tersebut. Melalui himpunan FPRB tingkat kabupaten, BPBD terus melakukan komunikasi dengan relawan FPRB terkait perkembangan destana, kegiatan yang akan dilaksanakan, hingga desa-desa yang sudah destana tapi kegiatannya *kembang kempis* semua dimonitor melalui himpunan tersebut.

Kedua, BPBD Bantul setiap tahun melaksanakan kegiatan “turun ke bawah” yaitu kegiatan pertemuan dalam bentuk sarasehan yang dilakukan di level kecamatan. Sarasehan tersebut mengundang FPRB desa dengan tujuan menggali permasalahan di FPRB level desa. Kecamatan yang menjadi target BPBD adalah kecamatan yang terdiri dari FPRB yang tidak aktif. BPBD berharap melalui sarasehan tersebut FPRB dapat

kembali aktif melaksanakan kegiatan desa tangguh bencana. BPBD juga membantu FPRB menyampaikan rekomendasi ke pihak desa terkait kebutuhan yang perlu dianggarkan. Kegiatan turun ke bawah ini belum pernah dilaksanakan di Desa Srimartani.

Desa Srimartani dibentuk pada November 2017. Monitoring dan evaluasi terhadap program destana seharusnya sudah dilaksanakan pada tahun 2018, monitoring dilakukan secara berkala 3 bulan sekali dan evaluasi dilakukan pada akhir tahun. Tetapi di tahun 2018 belum ada monitoring dan evaluasi terhadap program destana. Satu-satunya bentuk pemantuan dari BPBD hanya melalui hipunan FPRB kabupaten untuk *update* informasi terkait pelaksanaan destana di level desa. Kendala mengapa kegiatan monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan adalah karena instrumen untuk melakukan monev masih dalam kajian BNPB sehingga belum dapat diterapkan.

b. Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi dan Rencana Tindak

Lanjut

Idealnya kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala, didokumentasikan dalam bentuk laporan, dan dilakukan kajian terhadap hasil monev dengan output rencana tindak lanjut. Kemudian rencana tindak lanjut tersebut diimplementasikan. Faktanya hal tersebut belum diterapkan dalam monitoring dan evaluasi program destana di Desa Srimartani. Monitoring dan evaluasi belum berjalan sehingga belum

terdapat dokumen hasil monitoring dan evaluasi atau laporan kegiatan destana di Desa Srimartani.

Berdasarkan hasil wawancara pada 22 Mei 2019 dengan Paksi Lingga selaku Sekretaris FPRB Desa Srimartani terkait dengan laporan kegiatan destana disampaikan bahwa :

“Monev tidak ada. Laporan kegiatan destana juga gak ada. Kalau apa-apa gak pernah diarsipkan asal jalan gak ada dokumentasi foto gak ada dokumen kegiatan, apa yang harus diarsipkan gak digubris soalnya gak ada yang ngurus. Pas mau ikut lomba dokumen disiapkan dalam waktu berapa hari itu gak ada yang jadi. Laporan keuangan FPRB gak bikin cuma ngumpulin nota dikumpulkan ke desa.”

Paksi Lingga sebagai Sekretaris FPRB Desa Srimartani menyampaikan bahwa FPRB tidak membuat laporan kegiatan program destana 2017 dan 2018. Selama ini kegiatan destana seperti simulasi bencana, pelatihan relawan, dan penanganan saat terjadi bencana berjalan tetapi kegiatan tersebut sekedar berjalan saja tanpa ada laporan pertanggung jawaban. Paksi Lingga juga menyampaikan bahwa laporan dan pengarsipan merupakan salah satu permasalahan yang ada di FPRB. Desa Srimartani pada akhir tahun 2018 lalu mengikuti lomba destana tingkat DIY mewakili Kabupaten Bantul. Pada lomba tersebut kekurangan Desa Srimartani terletak pada kurang lengkapnya dokumen, karena dokumen untuk lomba baru disiapkan oleh FPRB Desa Srimartani beberapa hari sebelum lomba.

Monitoring evaluasi dan laporan hasil monitoring evaluasi perlu menjadi perhatian bagi FPRB dan pemerintah Desa Srimartani. Tanpa kegiatan monitoring dan evaluasi beserta laporan dokumentasinya tidak

dapat diketahui bagaimana kegiatan destana berjalan dan sejauh mana tujuan telah tercapai. Pada saat terjadi pergantian kepengurusan di FPRB dan pemerintah Desa Srimartani yang bertanggung jawab pada program destana, maka tidak ada dokumen yang bisa menjadi acuan.

Proses pelaksanaan atau implementasi program destana di Desa Srimartani pada tahun 2017 dan 2018 telah berjalan walaupun belum secara optimal. Pada tahap pelaksanaan parameter *Pertama*, implementasi kegiatan destana sudah sesuai dengan dokumen RPB yaitu peningkatan kesiapsiagaan masyarakat berupa sosialisasi, simulasi, pelatihan relawan, dan pembelian peralatan. *Kedua*, realisasi anggaran untuk kegiatan pengembangan kapasitas terealisasi sebesar 100% menurut laporan realisasi APBDesa Srimartani tahun 2017 dan 2018. Tetapi tidak ada transparansi dan akuntabilitas yang dibuktikan dengan tidak adanya laporan kegiatan dan laporan keuangan destana, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui output apa saja yang didapat dengan realisasi anggaran tersebut. *Ketiga*, masyarakat telah ikut serta berpartisipasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan telah dilaksanakan. *Keempat*, hambatan yang ditemui adalah tidak semua relawan FPRB aktif. Sedangkan untuk tahap monitoring dan evaluasi masih belum terdapat kegiatan monev, belum terdapat laporan monitoring dan evaluasi kegiatan program destana serta rencana tindak lanjutnya.

3.4 Product

Product dalam evaluasi program Daniel Stufflebeam bertujuan untuk menilai keberhasilan program. Pada indikator *product* ini akan dinilai sejauh mana

tujuan program destana di Desa Srimartani tercapai, yang dapat dilihat dari sejauh mana ketahanan masyarakat telah terbangun. Parameter untuk indikator *product* pada evaluasi program desa tangguh bencana di Desa Srimartani diantaranya yaitu:

Pertama, hasil program destana dapat diukur melalui adanya kegiatan peningkatan kapasitas untuk masyarakat berupa sosialisasi dan simulasi, adanya kegiatan pengembangan kapasitas bagi relawan, terdapat sistem peringatan dini, serta terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul. *Kedua*, dampak program destana yang dapat dinilai dari meningkatnya pengetahuan dan kesadaran di masyarakat, perubahan sikap di masyarakat, dan keberhasilan masyarakat dalam merespon bencana. *Ketiga*, keberlanjutan program destana atau komitmen seluruh pemangku kepentingan yang dapat dinilai dari rencana yang akan dilakukan untuk kelanjutan program destana ke depan.

3.4.1 Hasil Program Destana di Desa Srimartani

Berikut merupakan hasil kegiatan program desa tangguh bencana di Desa Srimartani pada tahun 2017 dan 2018 :

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas untuk Masyarakat Desa Srimartani

Kegiatan peningkatan kapasitas untuk masyarakat terdiri dari kegiatan sosialisasi dan simulasi. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat mengenai bencana dan penanganannya. Sehingga masyarakat mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan saat bencana dan sesudah bencana terjadi.

FPRB Desa Srimartani tidak memiliki laporan mengenai kegiatan destana yang telah dilaksanakan pada tahun 2017-2018 lalu. Sekretaris FPRB Paksi Lingga menyampaikan bahwa kegiatan yang telah berjalan tidak terarsipkan dalam bentuk dokumen. Sehingga data mengenai kegiatan peningkatan kapasitas untuk masyarakat Desa Srimartani didapatkan melalui wawancara dengan masyarakat dan relawan FPRB.

Tabel 8. Kegiatan sosialisasi untuk masyarakat Desa Srimartani tahun 2017-2018

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah Peserta	Pelaksana
1.	Sosialisasi Destana	November 2017	Balai Desa Srimartani	Tidak ada absensi. Dihadiri relawan FPRB, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat dari setiap dusun.	BPBD Bantul
2	Sosialisasi Destana	November 2017	Balai Desa Srimartani	Tidak ada absensi. Dihadiri relawan FPRB, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat dari setiap dusun.	BPBD Bantul
3	Sosialisasi longsor	2018	Dusun Tambalan	+ - 100 KK	FPRB Srimartani

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

Tabel di atas merupakan data kegiatan sosialisasi untuk masyarakat Desa Srimartani pada tahun 2017-2018. Pada tahun 2017 sosialisasi mengenai program desa tangguh bencana dan bencana secara umum pernah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada bulan November. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada saat awal pembentukan destana sebagai syarat pembentukan destana. Materi sosialisasi disampaikan langsung oleh fasilitator destana dari BPBD Kabupaten Bantul. Sosialisasi dihadiri oleh

relawan FPRB, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat dari setiap dusun.

Sedangkan sosialisasi pada tahun 2018 pernah dilaksanakan satu kali di Dusun Tambalan. Pemateri dalam sosialisasi ini adalah relawan FPRB Srimartani dan BPBD Bantul. Sosialisasi dilaksanakan sebelum kegiatan simulasi longsor sehingga materi yang disampaikan adalah mengenai longsor dan penanganannya. Peserta sosialisasi adalah seluruh warga Dusun Tambalan yang berjumlah sekitar 100 KK.

Tabel 9. Kegiatan simulasi bencana di Desa Srimartani tahun 2017-2018

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah Peserta	Pelaksana
1	Simulasi Longsor	Februrari 2017	Dusun Sanansari dan Bulusari	Tidak ada absensi, peserta masyarakat Dusun Sanansari dan Bulusari	FPRB Srimartani
2	Simulasi Banjir	21 April 2018	Dusun Wanojoyo Kidul	Tidak ada absensi, peserta masyarakat Dusun Wanojoyo Kidul.	FPRB Srimartani
3	Simulasi Longsor	2018	Dusun Tambalan	+/- 100 KK	FPRB Srimartani

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

Tabel di atas merupakan data kegiatan simulasi bencana di Desa Srimartani pada tahun 2017-2018. Kegiatan simulasi di Desa Srimartani telah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Pada tahun 2017 simulasi longsor dilaksanakan sebanyak 1 kali di Dusun Sanansari dan Bulusari. Pada tahun 2018 terdapat 2 kali simulasi yaitu simulasi banjir di Dusun Wanojoyo Kidul dan simulasi longsor di Dusun Tambalan. Simulasi merupakan

latihan teknis bagi relawan FPRB dan masyarakat supaya mengetahui tindakan serta peran apa yang dapat dilakukan pada saat bencana terjadi. Jadi sejauh ini jenis simulasi bencana yang sudah dilaksanakan ada 2 yaitu :

1) Simulasi longsor

Pada tahun 2017-2018 simulasi longsor telah dilaksanakan di 3 dusun yaitu Dusun Sanansari, Bulusari, dan Tambalan atau Pos Piyungan. Desa Srimartani memiliki 8 dusun yang memiliki risiko ancaman longsor dan 6 diantaranya memiliki tingkat kerawanan tinggi. Ke enam dusun tersebut adalah Dusun Umbulsari RT 1 sampai dengan 4; Pos Piyungan RT 4, 5, dan 6; Bulusari RT 1 sampai dengan 6; Rejosari RT 2 sampai dengan 6; Kemloko RT 1 sampai dengan 4; serta Mojosari RT 1 sampai dengan 5 (FPRB Srimartani, 2018).

Pada saat observasi ke wilayah rawan longsor di empat Dusun yaitu Tambalan, Kemloko, Bulusari, dan Mojosari. Wawancara dilakukan dengan perwakilan masyarakat di setiap dusun. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, hanya masyarakat di Dusun Tambalan saja yang memahami kegiatan simulasi karena sudah pernah mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 22 Mei 2019 dengan warga RT 5 Dusun Tambalan yaitu Ngadiran dan Rias disampaikan mengenai kegiatan pada saat simulasi longsor.

“Pas simulasi ya mbak nanti tu ada alur ceritanya. Pertama kita aktivitas seperti biasa pagi, terus tiba-tiba ada sirine longsor bunyi terus warga pada berlarian ke tempat yang aman. Titik kumpulnya ada di depan masjid tanah kosong itu. Nanti warga ada yang luka-luka

ringan, luka berat, ada yang bawa hewan. Nanti terus setelah itu ada apa namanya ada simulasi buat evakuasi nolongin nah tempat nya disini mbak (menunjuk ke tebing miring) nolongin korban yang tertimbun longsor. Setelah dievakuasi ke bawah yang aman terus dibawa ambulan ke rumah sakit untuk ditangani. Kalau untuk yang luka-lukanya ringan nanti disini disediakan posko darurat nanti ditanganinya disitu.” (Rias, warga RT 5 Dusun Tambalan, Hasil Wawancara, 22 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan masyarakat Dusun Tambalan serta dokumentasi video kegiatan simulasi longsor di Dusun Sanansari dan Bulusari. Kegiatan simulasi longsor dilaksanakan dengan alur berikut. Ketika hujan mulai turun dengan intensitas yang cukup deras dan atau dengan waktu yang lama relawan FPRB mulai melakukan pemantauan ke dusun-dusun. Apabila terdapat potensi longsor maka akan dilakukan koordinasi dan pengumuman ke warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Saat longsor terjadi sistem peringatan dini seperti sirine ews dan kentongan akan berbunyi, kemudian akan ada pengumuman supaya warga bergegas menuju titik kumpul.

Ketika sirine dari ews berbunyi masyarakat segera berlari ke tempat aman dan berkumpul di titik kumpul. Relawan FPRB segera melakukan evakuasi. Masyarakat yang memiliki luka ringan akan mendapat pertolongan pertama, sedangkan yang memiliki luka berat segera dilarikan ke rumah sakit. Relawan FPRB melakukan evakuasi sambil berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk segera menghubungi pihak lain untuk meminta bantuan apabila diperlukan.

Kegiatan simulasi bencana tidak hanya melibatkan relawan FPRB dan warga tetapi melibatkan peran banyak pihak lain yaitu pemerintah Desa Srimartani, BPBD Bantul, Puskesmas Piyungan, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari camat, kapolsek, dan komandan koramil. Setiap instansi memiliki peran masing-masing relawan bekerja sesuai pembagian sektor, BPBD bantul memberikan arahan, puskesmas melakukan perawatan terhadap korban dan membuat pos kesehatan, RAPI fokus pada bagain informasi dan komunikasi, polsek dan koramil melakukan kemananan dan membantu evakuasi, serta kepala desa dan camat mengambil keputusan terkait hal-hal penting.

Masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam sosialisasi dan simulasi bencana longsor memahami dengan baik tindakan yang harus dilakukan saat bencana longsor terjadi. Berbeda dengan masyarakat yang di dusunya belum pernah dilaksanakan kegiatan simulasi. Dusun Kemloko dan Mojosari masuk dalam 6 dusun yang memiliki risiko ancaman tinggi terhadap longsor tetapi belum pernah dilaksanakan simulasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di dusun tersebut mengenai longsor dan kegiatan simulasi disampaikan bahwa :

“Kayaknya di sini belum ada simulasi, kalau sosialisasi udah. Sosialisasi udah lama mbak 2017. Pas masa setelah badai cempaka itu di SD Rejosari dari BPBD Bantul kalau waktu itu saya berangkat malam. Saya ingin tahu cara bagaimana menaggulangi kalau ada bencana supaya bias menyelamatkan diri dan keluarga.” (Solihin, warga RT 2 Dusun Mojosari, Hasil Wawancara 22 Mei 2019)

“Belum ada simulasi, kalau tinjauan ada pas pertama longsor tapi sampai sekarang belum ada apa-apa. Simulasi belum ada. Gak ada wong itu kalo pas hujan terus tahu-tahu tanahnya dah *grubyuk* dah *bablas* gak ada yang tahu yang tahu yang punya rumah kan dengar. Tapi gak bisa tidur kalo udah bencana mbak, kan posisinya malem pas hujan terus di luar.” (Tukijan, warga Dusun Kemloko, Hasil Wawancara 22 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Dusun Mojosari dan Kemloko disebutkan bahwa belum pernah ada kegiatan simulasi longsor di dusun tersebut. Belum adanya kegiatan simulasi di 2 dusun tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara detail terkait apa yang harus dilakukan saat longsor terjadi. Tukijan warga Dusun Kemloko yang di depan rumahnya pernah terjadi longsor menyampaikan bahwa setiap kali hujan di malam hari keluarganya tidak tenang karena takut terjadi longsor. Selama ini belum ada peringatan atau arahan ke warga saat terdapat potensi longsor di Dusun Kemloko.

2) Simulasi Banjir

Simulasi banjir pernah dilaksanakan satu kali pada tanggal 21 April 2018 di Dusun Wanojoyo Kidul. Banjir besar sebelumnya pernah terjadi di Desa Srimartani pada saat badai cempaka bulan November 2017 lalu. Alur kegiatan simulasi banjir ini didapat dari dokumentasi video FPRB Srimartani.

Pada saat hujan turun dengan intensitas tinggi dan waktu yang lama, relawan FPRB melakukan pemantauan di Sungai Gawe. Kemudian relawan di lapangan melaporkan ke posko induk. Relawan berkoordinasi dan memberikan pengumuman waspada kepada warga terutama warga di

Dusun Wonojoyo Kidul dan Kwasen. Pada saat air meluap sistem peringatan dini berbunyi dan warga segera mengungsi. Relawan FPRB dan SAR melakukan evakuasi dan menyalisir rumah warga.

Pada saat simulasi banjir pihak yang terlibat sama seperti saat simulasi longsor yaitu relawan FPRB, warga, pemerintah Desa Srimartani, BPBD Bantul, Puskesmas Piyungan, Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), serta anggota Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) yang terdiri dari camat, kapolsek, dan komandan koramil. Semua pihak melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

Desa Srimartani terdiri dari 17 dusun dengan potensi ancaman bencana angin kencang, longsor, banjir, gempa bumi, kebakaran, dan erupsi. Sejauh ini di tahun 2017 dan 2018 simulasi yang sudah dilaksanakan adalah simulasi bencana longsor dan banjir. Bencana longsor merupakan ancaman bencana yang menjadi fokus pemerintah Desa Srimartani saat ini, sehingga simulasi yang menjadi prioritas adalah simulasi longsor di 8 dusun yang memiliki potensi ancaman bencana longsor. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya simulasi bencana harus dilaksanakan di semua dusun di Desa Srimartani sesuai potensi ancaman bencana di masing-masing dusun.

b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas untuk Relawan FPRB

Relawan FPRB Desa Srimartani yang anggotanya terdiri dari masyarakat Desa Srimartani sendiri merupakan faktor penting berjalannya kegiatan program destana. Relawan FPRB memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk dapat memberikan informasi kepada

masyarakat serta untuk dapat melaksanakan tugasnya. Relawan FPRB dalam menjalankan tugasnya dibagi ke dalam delapan klaster atau sektor yaitu diklat, SAR dan evakuasi, kesehatan atau PPGD, dapur umum, informasi dan komunikasi, data dan dokumentasi, logistik, dan keamanan.

Amat Yani selaku ketua FPRB Srimartani menyampaikan melalui wawancara pada 2 Mei 2019 bahwa kegiatan peningkatan kapasitas bagi relawan telah dilaksanakan melalui kegiatan diskusi, pelatihan, maupun simulasi. Materi yang disampaikan adalah pengetahuan mengenai manajemen bencana dan teknis penanganan. Pada tahun 2017 dan 2018 berikut kegiatan peningkatan kapasitas bagi relawan FPRB yang telah dilaksanakan :

Tabel 10. Kegiatan peningkatan kapasitas relawan FPRB Desa Srimartani tahun 2017-2018

No	Materi	Waktu	Tempat	Jumlah Peserta	Pemateri
1	Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)	2017	Balai Desa Srimartani	20-25 orang	PMI
2	Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)	November 2018	Balai Desa Srimartani	20-25 orang	PMI
3	<i>Search and Rescue</i> (SAR)	November 2018	Satgas SAR DIY	1-2 orang	Satgas SAR DIY
5	Diklat PPGD, vertical rescue, dan water rescue	2018	Desa Selopamioro Imogiri	25 orang	FPRB Srimartani

Sumber : Diolah dari hasil wawancara

Berdasarkan informasi pada tabel di atas materi peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan untuk relawan FPRB Srimartani adalah mengenai PPGD, dapur umum, dan evakuasi. Berikut merupakan detail kegiatan tersebut:

1) Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)

Amat Yani menyampaikan bahwa pertolongan pertama gawat darurat adalah ketrampilan yang harus dimiliki seluruh anggota relawan FPRB tidak hanya anggota klaster kesehatan. Saat bencana terjadi PPGD penting untuk mencegah bertambahnya korban. Walaupun saat bencana terjadi ada bantuan dari anggota medis Puskesmas Piyungan, relawan FPRB tetap harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan PPGD.

Maka dari itu materi mengenai PPGD sudah berulang kali disampaikan melalui diskusi pada pertemuan rutin dan pelatihan yang pernah dilaksanakan sebanyak 2 kali di tahun 2017 dan 2018. Materi pelatihan PPGD disampaikan oleh Palang Merah Indonesia (PMI). Berdasarkan hasil wawancara dengan Paksi Lingga selaku relawan FPRB pada 23 Mei 2019 menyampaikan terkait kegiatan pelatihan PPGD. Paksi Lingga menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan PPGD terdiri dari penjelasan mengenai pertolongan pertama, kemudian diberikan contoh oleh anggota PMI, dan dipraktikkan langsung oleh relawan FPRB. Materi yang diberikan diantaranya adalah menganalisa korban dari nafas dan nadi, bagaimana memindahkan korban ke tempat yang aman, membuat bidai, dan lain sebagainya.

2) *Search and Rescue (SAR), Water Rescue, Vertical Rescue*

Pelatihan pencarian dan penyelamatan atau SAR perlu dimiliki oleh relawan FPRB. Pelatihan ini pernah dilaksanakan sebanyak 2 kali

yang pertama pelatihan SAR yang diadakan oleh satuan tugas SAR DIY pada November 2018 yang diwakilkan oleh beberapa relawan FPRB Srimartani. Kemudian yang kedua adalah pelatihan *water rescue* dan *vertical rescue* yang diadakan oleh FPRB Srimartani.

Pelatihan *water rescue* dan *vertical rescue* dilaksanakan di Desa Selopamioro Imogiri yang diikuti oleh sekitar 25 orang relawan FPRB Srimartani. Pelatihan tersebut bertujuan untuk melatih ketrampilan evakuasi pada medan sulit. Desa Srimartani memiliki potensi ancaman longsor dan banjir, pelatihan *vertical rescue* bertujuan supaya relawan dapat melakukan evakuasi korban pada lereng atau tebing. Sedangkan *water rescue* bertujuan supaya relawan dapat melakukan evakuasi pada korban tengelam atau terseret arus sungai.

Amat Yani menyampaikan bahwa relawan FPRB dibagi menjadi beberapa sektor dan mereka akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan tugas pada sektor masing-masing. Sektor kesehatan mendapatkan pelatihan PPGD seperti yang sudah dijelaskan di atas. Sektor SAR dan evakuasi mendapatkan pelatihan SAR, *water rescue*, dan *vertical rescue*. Selain pelatihan PPGD dan SAR relawan FPRB juga melakukan jenis pelatihan lain saat kegiatan simulasi bencana berlangsung seperti sektor dapur umum yang berlatih membuat paket makanan untuk sejumlah korban dalam satu hari dengan menggunakan perhitungan. Selanjutnya sektor logistik dan keamanan juga akan dilatih. Sektor logistik akan dilatih

manajemen gudang yaitu bagaimana cara menata posko. Sektor kewanman akan diadakan seleksi dan latihan dengan linmas.

Jumlah relawan FPRB Srimartani saat ini berdasarkan jumlah anggota grup Whatsapp adalah 59 anggota. Amat Yani, Paksi Lingga, dan Puji selaku relawan FPRB Srimartani menyampaikan melalui wawancara bahwa dari total jumlah anggota hanya sekitar 20-25 anggota yang aktif, seperti jumlah peserta pada kegiatan peningkatan kapasitas relawan. Maka persentase jumlah relawan yang aktif hanya sebesar 38%.

c. Terdapat Sistem Peringatan Dini



Gambar 15. *Early Warning System (EWS) Longsor di Dusun Tambalan*

Sumber : Hasil Observasi

Desa Srimartani memiliki 2 alat *early warning system* atau sistem peringatan dini untuk bencana tanah longsor, yaitu ews dari BPBD Kabupaten Bantul seperti pada gambar 3 dan ews semi manual berupa alarm sederhana yang dibuat oleh FPRB Desa Srimartani. EWS dari

BPBD hanya berjumlah 1 buah yang terletak di Dusun Pos Piyungan, padahal Desa Srimartani memiliki 6 dusun yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap longsor.

Cara kerja ews longsor dari BPBD Bantul adalah ada beberapa alat seperti gambar 14 yang bagian bawahnya terdiri dari kawat. Alat tersebut ditanam di bawah tanah pada daerah yang memiliki kemiringan tanah dan rawan terhadap longsor. Saat terjadi pergerakan tanah, alat tersebut akan mengirimkan sinyal ke pusat di Bantul. Kemudian empat buah sirine seperti pada gambar 14 yang ada di Dusun Pos Piyungan akan berbunyi dan terdengar ke seluruh dusun.

Ews semi manual milik FPRB hanya dipasang ketika ada rekahan sehingga saat terjadi pergerakan tanah relawan FPRB mengetahui. Cara kerja ews sederhana yang dibuat FPRB berdasarkan hasil wawancara dengan relawan FPRB pada 19 Mei 2019 disampaikan bahwa :

“Kalau dulu sebelum ada ini (ews dari BPBD) udah ada ews dari FPRB. Ews FPRB itu alat sederhana, cuma menggunakan paku dan ada apa ya namanya kayak on off gitu. Alat diposisikan off dihubungkan dengan tali ke paku yang ditanam. Ketika nanti ada tarikan ke bawah dari tali yang dikaitkan ke paku, otomatis alat menjadi on dan sirinanya bunyi.”

Ews yang dibuat oleh FPRB hanya merupakan alat sederhana sehingga keakuratan alat tersebut masih kurang efektif. Masyarakat Dusun Pos Piyungan menyampaikan melalui wawancara mengenai ews sederhana tersebut bahwa :

“Tapi kurang aman solanya kenapa, kalo alat digeser binatang apa kejatuhan ranting itu bunyi. Pernah malam-malam hujan, mati lampu terus sirine bunyi. Warga lari semua, bapak sampai digendong sama Yani sama Totok ternyata kok gak berhenti-berhenti ada ranting cemantel.” (Ngadiran, Masyarakat RT 5 Dusun Pos Piyungan, Hasil Wawancara, 22 Mei 2019)

Peringatan mengenai bencana selain melalui ews juga diinformasikan melalui whatsapp grup. Sumber informasi pertama berasal dari grup wa BMKG kemudian disampaikan ke grup FPRB dan diteruskan sampai ke grup dusun dan rt. Selain grup wa ada juga sistem peringatan dini tradisional seperti kentongan dan alat pengeras suara di masjid dan mushola (Agus Totok, Staff Sie Pemerintahan Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019).

d. Terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul

Jalur evakuasi, titik kumpul sementara, dan titik kumpul akhir merupakan salah satu bagian dari rencana evakuasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amat Yani selaku Ketua FPRB Desa Srimartani pada 2 Mei 2019 disampaikan bahwa telah disepakati jalur evakuasi dan titik kumpul di setiap dusun. Titik kumpul di dusun berada di tanah lapang atau tempat ibadah. Apabila bencana terjadi hanya pada beberapa titik di dusun dan tidak perlu untuk ke titik kumpul akhir maka masyarakat hanya berada di titik kumpul sementara di dusun. Sedangkan titik kumpul akhir sudah disepakati berada di lapangan desa sudarsono. Infrastruktur untuk titik kumpul akhir di lapangan desa sudarsono belum maksimal hanya tanah lapang dan 1 tenda untuk dapur umum, tenda lain baru masuk anggaran tahu 2019.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 22 Mei ke wilayah dusun di Desa Srimartani belum terdapat rambu-rambu mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Amat Yani selaku Ketua FPRB bahwa memang belum terdapat rambu-rambu tetapi sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2019 ini dan akan segera dipesankan.

Tidak adanya rambu-rambu mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul berdampak pada pengetahuan masyarakat mengenai teknis evakuasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan satu masyarakat di 4 dusun yaitu Dusun Pos Piyungan, Kemloko, Mojosari, dan Bulusari hanya warga Pos Piyungan yang mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul di dusunnya. Ngadiran dan Rias melalui wawancara pada 22 Mei 2019 menyampaikan bahwa titik kumpul di Dusun Pos Piyungan berada pada lahan kosong di depan masjid. Informasi mengenai teknis evakuasi didapat pada saat sosialisasi dan simulasi bencana longsor di Dusun Pos Piyungan pada akhir 2018.

3.4.2 Dampak Program Destana di Desa Srimartani

Kegiatan program destana berupa sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan simulasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun ketahanan masyarakat. Komunitas atau masyarakat yang memiliki ketahanan yang baik terhadap bencana adalah masyarakat yang mampu untuk meminimalkan kerugian yang diakibatkan oleh bencana,

merespon bencana dengan cepat dan tepat serta mampu memulihkan diri secara mandiri.

Ketahanan masyarakat menurut Rhys Price Roberston dan Ken Knight (2012) terdiri dari tiga elemen yaitu karakteristik fisik, karakteristik prosedural, dan karakteristik sosial. Karakteristik fisik berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat untuk bertahan hidup.

Karakteristik prosedural merupakan strategi dan sistem untuk perencanaan kegiatan respon dan pemulihan. Sedangkan karakteristik sosial masyarakat adalah kondisi sosial masyarakat yang dapat mendukung kegiatan tanggap darurat maupun pemulihan.

Pada bagian ini akan dijelaskan dampak program destana terhadap karakteristik sosial yang ada di masyarakat Desa Srimartani. Kegiatan program destana diharapkan dapat memberikan dampak secara bertahap terhadap pengetahuan, kesadaran, sikap atau tindakan masyarakat, dan yang terakhir terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon bencana dan melakukan pemulihan. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan relawan FPRB mengenai dampak kegiatan desa tangguh bencana yang telah dilaksanakan pada tahun 2017-2018 terhadap masyarakat Desa Srimartani adalah sebagai berikut :

**a. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai bencana di
Desa Srimartani**

Perubahan paling dasar yang seharusnya terjadi di masyarakat setelah kegiatan desa tangguh bencana dilaksanakan adalah bertambahnya pengetahuan mengenai bencana, timbulnya kesadaran di masyarakat bahwa mereka tinggal di wilayah yang rawan terhadap potensi ancaman bencana, dan kemudian diikuti dengan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi risiko bencana. Hal tersebut juga disampaikan oleh Amat Yani selaku Ketua FPRB Srimartani pada wawancara tanggal 2 Mei 2019. Ketua FPRB Srimartani menyampaikan mengenai tujuan kemandirian yang ingin dicapai yaitu:

“Masyarakat paham tentang bencana, sadar bahwa mereka berada di kawasan rawan, masyarakat menjadi waspada bisa melihat tanda-tanda, ketika ada tanda-tanda masyarakat tahu apa yang harus dilakukan.” (Amat Yani, Ketua FPRB Srimartani, Hasil wawancara, 2 Mei 2019).

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai potensi ancaman bencana yang ada di Desa Srimartani dapat diukur melalui wawancara dengan masyarakat dan juga partisipasi masyarakat dalam kegiatan destana. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang berada di empat dusun rawan longsor yaitu Dusun Tambalan, Kemloko, Bulusari, dan Mojosari. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di empat dusun tersebut, mereka memiliki tingkat pemahaman yang berbeda mengenai bencana serta tindakan apa yang perlu dilakukan.

Rias dan Ngadiran warga Dusun Tambalan yang rumahnya sudah 3 kali terkena longsor dapat menjelaskan dengan baik mengenai tindakan yang harus dilakukan saat longsor. Hal tersebut dikarenakan pada akhir 2018 baru saja dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan simulasi longsor di dusun tersebut dan mereka ikut serta berpartisipasi. Kemudian Solihin warga Dusun Mojosari yang depan rumahnya terdapat longsor juga memiliki pengetahuan yang cukup, terlihat dari rekahan di depan rumah yang ditutupi dengan terpal. Di Dusun Mojosari belum pernah dilaksanakan kegiatan simulasi, tetapi Solihin secara aktif mengikuti informasi yang disampaikan oleh FPRB dan ikut serta dalam kegiatan evakuasi saat di dusun Mojosari terdapat bencana.

Berbeda dengan Paut dan Tukijan warga Dusun Kemloko yang pengetahuan mengenai bencana khususnya longsor masih sangat minim. Warga Dusun Kemloko yang depan rumahnya juga terdapat longsor tersebut menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui mengenai peringatan dini yang ada, tidak mengetahui harus kemana untuk menyelamatkan diri saat terjadi bencana, dan juga menyampaikan ketika terjadi hujan deras tidak bisa tidur karena takut longsor. Masyarakat Dusun Kemloko belum pernah mendapatkan edukasi dari FPRB melalui sosialisasi dan simulasi, tetapi sudah pernah dilakukan pemantauan dan pemasangan terpal di depan rumah warga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap warga memiliki pengetahuan dan kesediaan yang berbeda-beda. Kesadaran

masyarakat muncul sebagian besar karena kejadian longsor sudah pernah terjadi di wilayah tempat tinggal mereka. Selain itu juga dipengaruhi oleh apakah di dusun tersebut sudah pernah dilaksanakan kegiatan desa tangguh bencana atau belum. Tetapi secara umum disampaikan oleh relawan FPRB bahwa pengetahuan masyarakat telah meningkat karena FPRB secara aktif selalu membagikan informasi kepada masyarakat tidak hanya melalui forum resmi seperti sosialisasi dan simulasi tetapi juga melalui sosial media.

b. Tindakan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana

Setelah pengetahuan masyarakat mengenai bencana bertambah melalui kegiatan destana dan masyarakat menyadari bahwa Desa Srimartani merupakan wilayah yang rawan terhadap potensi ancaman bencana, kemudian masyarakat seharusnya mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam bentuk tindakan. Amat Yani menyampaikan bahwa diharapkan masyarakat dapat selalu waspada dan mampu melihat tanda-tanda, kemudian melakukan tindakan saat terdapat tanda-tanda. Tindakan yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan relawan FPRB Srimartani masyarakat Desa Srimartani sudah beberapa kali melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan risiko. Bencana yang paling sering terjadi di Desa Srimartani adalah angin kencang dan longsor. Pencegahan atau pengurangan risiko yang dilakukan masyarakat dan relawan adalah

memotong dahan pohon yang rawan terkena angin kencang dan juga menutup rekahan tanah menggunakan terpal supaya saat hujan tidak semakin melebar dan menyebabkan longsor.



Gambar 16. Kerja bakti pemotongan dahan pohon

Sumber : Dokumentasi Facebook FPRB Desa Srimartani



Gambar 17. Terpal pada rekahan tanah

Sumber: Observasi

c. Keberhasilan masyarakat dan relawan FPRB dalam merespon bencana di Desa Srimartani

Keberhasilan masyarakat dan relawan FPRB dalam melakukan kegiatan tanggap darurat dan pemulihan merupakan salah satu indikator bahwa ketahanan masyarakat sudah terbentuk. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memerlukan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk dapat melakukan kegiatan tanggap darurat dan pemulihan dengan tepat dan cepat. Apabila masyarakat atau komunitas sudah dapat merespon bencana secara baik maka upaya peningkatan kapasitas melalui serangkaian kegiatan kesiapsiagaan berupa pendidikan, pelatihan, sosialisasi, dan simulasi untuk masyarakat dan relawan FPRB dapat dikatakan berhasil.

Amat Yani selaku Ketua FPRB menyampaikan dalam wawancara pada 2 Mei 2019, bahwa masyarakat Desa Srimartani pertama kali melakukan kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pada saat gempa bumi jogja tahun 2006. Kondisi saat itu mengharuskan masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan tanggap darurat dan pemulihan. Kemudian pada tahun 2010 masyarakat terlibat lagi pada saat erupsi merapi karena di Desa Srimartani terdapat posko. Pada saat itu masyarakat Desa Srimartani yang sering terlibat dalam kegiatan kebencanaan belum menjadi bagian dari relawan kebencanaan karena Organisasi Pengurangan Risiko Bencana baru dibentuk pada tahun 2012.

Setelah program destana di bentuk pada November 2017 Desa Srimartani sudah beberapa kali terkena bencana, seperti banjir, angin kencang, dan longsor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Amat Yani, relawan FPRB mencoba merespon setiap kejadian bencana sesuai dengan aturan dan pembagian tugas yang sudah disepakati. Badai cempaka yang terjadi pada 28-30 November 2017 merupakan pengalaman pertama bagi relawan FPRB dan masyarakat dalam merespon bencana setelah program destana mulai dibentuk.

Pada saat badai cempaka terjadi Desa Srimartani masih dalam tahap pembentukan program destana, tetapi masyarakat langsung di uji melalui kejadian bencana tersebut. Amat Yani selaku Ketua FPRB Desa Srimartani melalui wawancara menyampaikan tentang kejadian badai cempaka.

“Pada 28-30 November 2017 saat destana belum selesai kita langsung diuji dengan terjadi badai cempaka ada banjir dan longsor. Pada saat itu teman-teman diuji untuk melakukan penyelamatan jiwa, membangun posko, bagaimana memenuhi kebutuhan dasar pengungsi di beberapa titik, bagaimana melakukan kaji cepat, bagaimana melakukan perlindungan kepada masyarakat, dan upaya-upaya pemulihan walaupun belum maksimal.” (Amat Yani, Ketua FPRB Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019)



Gambar 18. FPRB melakukan assessment

Sumber : Facebook FPRB Srimartani



Gambar 19. Posko Bencana Badai Cempaka 2017

Sumber : Facebook FPRB Srimartani

Ketua FPRB Desa Srimartani menyampaikan bahwa dalam penanganan tanggap darurat badai cempaka relawan FPRB telah berusaha melaksanakan tugas sesuai dengan sektor masing-masing. Kegiatan tanggap darurat yang dilakukan diantaranya adalah melakukan evakuasi korban, melakukan pertolongan pertama, membangun posko, menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat, dan melakukan kaji cepat pendataan bencana. Selain relawan FPRB masyarakat juga ikut berpartisipasi seperti ibu-ibu yang tergabung dalam Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

membantu di dapur umum, pemuda karang taruna membantu *assessment* awal, dan bapak-bapak membantu evakuasi serta kerja bakti. Walaupun begitu Amat Yani menilai kegiatan tanggap darurat dan pemulihan pada saat badai cempaka belum dijalankan secara maksimal.

Selain badai cempaka yang terjadi pada November 2017 lalu, bencana longsor dan angin kencang juga sudah terjadi beberapa kali di Desa Srimartani pada kurun waktu tahun 2017 dan 2018. Masyarakat Desa Srimartani juga secara aktif membantu melakukan evakuasi tidak hanya relawan FPRB. Hal tersebut disampaikan oleh Amat Yani selaku Ketua FPRB bahwa:

“Dulu ketika ada kejadian masyarakat itu kecenderungannya hanya melihat. Saat longsor mereka hanya lihat, ada pohon tumbang hanya melihat ketika teman-teman (FPRB) melakukan evakuasi. Sekarang tidak, artinya mereka sudah melakukan memulai menyingkirkan, membersihkan, memotong. Kalau yang dianggap itu harus melibatkan teman-teman FPRB berkomunikasi dulu kemudian kerjakan bareng. Dengan sosialisasi yang dibangun baik secara langsung melalui forum maupun tidak langsung dengan *share*, dilibatkan teman-teman di setiap dusun ada di FPRB.” (Amat Yani, Ketua FPRB Srimartani, Hasil wawancara, 2 Mei 2019)

Amat Yani selaku Ketua FPRB menjelaskan dalam wawancara di atas bahwa sudah terdapat perubahan di masyarakat. Ketika relawan FPRB melakukan evakuasi dahulu kecenderungan masyarakat hanya akan melihat, tetapi sekarang masyarakat sudah bisa menangani sendiri. Apabila masyarakat membutuhkan bantuan dari relawan FPRB maka akan berkoordinasi dan mengerjakan bersama. Amat Yani menilai perubahan itu terjadi karena adanya sosialisasi ke masyarakat baik

melalui forum sosialisasi resmi, melibatkan perwakilan setiap dusun dalam FPRB, maupun *share* informasi.

d. Prestasi Desa Tangguh Bencana Srimartani

Desa Srimartani pada 5 Desember 2018 lalu berpartisipasi dalam lomba desa tangguh bencana se-provinsi DIY mewakili Kabupaten Bantul. Lomba ini menjadi salah satu sarana evaluasi untuk menilai ketangguhan desa. Indikator penilaian pada lomba destana tersebut adalah kelengkapan dokumen dan kesiapan desa dalam penanganan bencana yang dinilai dari simulasi.

Hasil penilaian lomba destana untuk Desa Srimartani adalah sarana prasarana yang dimiliki sudah cukup mendukung dan simulasi longsor telah dilaksanakan dengan baik (Tribunjogja.com, 2018). Sedangkan kekurangan Desa Srimartani terletak pada dokumen, hal tersebut juga disampaikan oleh relawan FPRB yaitu Paksi Lingga bahwa:

“Masalah dokumen kalau apa-apa gak diarsipkan asal jalan gak ada dokumentasi. Dokumen-dokumen apa yang harus diarsipkan gak *digubris* soalnya gak ada yang ngurus, itupun waktu mau ikut lomba dokumen disiapkan dalam waktu berapa hari itu gak ada jadi.” (Paksi Lingga, Sekretaris FPRB Srimartani, Hasil Wawancara, 23 Mei 2019)

Desa Srimartani melalui partisipasi dalam lomba destana se provinsi DIY tahun 2018 lalu, mendapatkan penghargaan dari BPBD DIY karena dinilai telah berperan aktif dalam pengelolaan ketangguhan desa atau kelurahan DIY. Sinergitas antara Pemerintah Desa Srimartani, FPRB

Srimartani, masyarakat serta berbagai lembaga yang telah bekerjasama merupakan kunci terlaksananya kegiatan destana di Desa Srimartani.



Gambar 20. Piagam Penghargaan dari BPBD DIY

Sumber : Hasil Observasi

3.4.3 Keberlanjutan Program Destana di Desa Srimartani

Keberlanjutan pelaksanaan program destana di Desa Srimartani memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Berikut merupakan bentuk komitmen BPBD Bantul, Pemerintah Desa Srimartani, FPRB Desa Srimartani, dan masyarakat Desa Srimartani dalam keberlangsungan kegiatan destana dalam beberapa tahun ke depan khususnya di tahun 2019.

a. Komitmen BPBD dalam kelanjutan program destana

BPBD Kabupaten Bantul yang diwakili oleh Budianto selaku Staff Sie Kesiapsiagaan menyampaikan bahwa bentuk komitmen BPBD Kabupaten Bantul dalam mendukung keberlangsungan program destana ke depan adalah dengan menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dengan

baik. BPBD sebagai fasilitator dapat memberikan materi atau melakukan pendampingan pada saat kegiatan destana dan juga melakukan pemantauan terhadap kegiatan destana melalui FPRB tingkat kabupaten.

Bentuk komitmen BPBD dalam mendukung program destana di Desa Srimartani salah satunya dapat dilihat dari ada tidaknya rencana kerjasama ke depan antara Desa Srimartani dan BPBD. BPBD Bantul menyampaikan melalui Budianto bahwa BPBD Bantul dan Desa Srimartani tidak memiliki perjanjian kerjasama dalam bentuk MoU, kerjasama antar BPBD dengan pihak desa atau FPRB cukup dengan mengajukan surat permohonan seperti surat permohonan menjadi narasumber.

Target BPBD ke depan mengenai program destana ada 3 hal yaitu: *Pertama*, membentuk semua desa di kabupaten Bantul menjadi destana untuk menuju kabupaten tangguh bencana. *Kedua*, ada anggaran desa yang dialokasikan untuk pengurangan risiko bencana. *Ketiga*, aktifnya FPRB dan relawan desa dalam kegiatan pengurangan risiko bencana

BPBD menilai kunci utama penyelenggaraan kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat desa adalah adanya sinergitas antara pemerintah desa, FPRB, dan masyarakat. BPBD menyampaikan bahwa beberapa desa sudah memiliki anggaran untuk kegiatan destana tetapi FPRB tidak aktif sehingga anggaran tidak terserap. Pada kasus lain terdapat desa yang kegiatan destananya berjalan tetapi anggaran desanya terbatas. Sedangkan

Desa Srimartani relawan FPRB telah aktif melaksanakan kegiatan destana dengan sumber dana berasal dari APBDesa Srimartani.

b. Komitmen Pemerintah Desa Srimartani dalam kelanjutan program destana

Komitmen pemerintah Desa Srimartani dalam kelanjutan program destana ditunjukkan dalam tiga hal berikut, yaitu: *Pertama*, terintegrasinya rencana penanggulangan bencana dengan RPJM Desa dan RKP Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana masuk sebagai bagian dari rencana pembangunan desa yang diprioritaskan. Agus Totok selaku Staff Sie Pemerintahan Desa Srimartani melalui wawancara pada 2 Mei 2019 menyampaikan bahwa :

“Program destana sudah terintegrasi dengan RPJMDes. Kalau yang dulu RPJMDes 2012-2018 masuk diperubahan. Kalau yang saat ini kan RPJMDes baru tahun 2019 jadi memang sudah ada kegiatan pengurangan risiko bencana dan tanggap darurat.” (Agus Totok selaku Staff Sie Pemerintahan Desa Srimartani, Hasil Wawancara, 2 Mei 2019)

Lilik selaku Kepala Urusan Perencanaan Desa Srimartani ditemui secara terpisah pada 2 Mei 2019 menyampaikan bahwa program destana yang terdiri dari kegiatan kesiapsiagaan sudah masuk dalam RPJM Desa Srimartani. Pada dokumen RPJM Desa Srimartani tahun 2019-2024 kegiatan penanggulangan bencana masuk diantara tujuh prioritas program pembangunan Desa Srimartani. Pada bagian prioritas pembangunan nomor

tujuh disebutkan mengenai peningkatan penanganan kesiapan penanggulangan bencana.

Kedua, adanya alokasi anggaran dari APBDes untuk program destana. Agus Totok menyampaikan bahwa, pemerintah Desa Srimartani telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan destana sejak tahun anggaran 2017. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Desa Srimartani dalam mendukung keberlanjutan program destana di tahun 2019 maka pemerintah juga mengalokasikan sejumlah anggaran seperti pada rincian berikut :

Tabel 11. Anggaran Program Destana tahun 2019

No	Tahun Anggaran	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1.	2019	a. Persiapan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa	Rp 40.268.000, 00	APBDes Desa Srimartani Tahun Anggaran 2019
		b. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa	Rp 13.700.000,00	
		c. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak desa (belanja tak terduga)	Rp 41.215.967, 00	

Sumber : Lampiran Peraturan Desa Srimartani No 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pemerintah Desa Srimartani mengalokasikan anggaran sebesar Rp 40.268.00,00 untuk kegiatan kesiapsiagaan di Desa Srimartani. Kegiatan

kesiapsiagaan dalam rincian APBDes masuk dalam anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Anggaran tersebut akan dikelola oleh FPRB untuk menjalankan program destana di tahun 2019. Pemerintah Desa Srimartani juga menganggarkan dana sebesar Rp Rp 13.700.000,00 untuk penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa.

Pemerintah Desa Srimartani menganggarkan belanja tak terduga untuk kegiatan tanggap darurat apabila terjadi bencana. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 41.215.967, 00 dibagi menjadi 3 bagian yaitu untuk kegiatan penanggulangan bencana sebesar Rp 10.327.442,00; untuk penanganan keadaan darurat sebesar Rp 5.258.773,00; dan untuk penanganan keadaan mendesak sebesar Rp 25.629.752,00.

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat merupakan bukti bahwa pemerintah Desa Srimartani telah melaksanakan fungsinya untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain itu juga menunjukkan bahwa pemerintah Desa Srimartani menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai salah satu agenda prioritas di tahun 2019.

Ketiga, Pemerintah Desa Srimartani di tahun 2019 ini menjalin kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dalam pembuatan rencana kontinjensi multi hazard di Desa Srimartani. Rencana kontinjensi yang dimiliki Desa Srimartani saat ini baru rencana kontinjensi tanah

longsor, padahal Desa Srimartani memiliki enam jenis potensi ancaman bencana. Pemerintah Desa Srimartani melalui kerjasama ini menunjukkan keterbukaan untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana di Desa Srimartani.

c. Komitmen anggota relawan FPRB dalam kelanjutan program

destana

Komitmen FPRB dalam kelanjutan program destana di tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya dapat diukur dari adanya rencana kegiatan pengurangan risiko bencana termasuk diantaranya kegiatan peningkatan kapasitas. Selain itu juga dapat diukur melalui aktifnya relawan FPRB dalam kegiatan destana. Amat Yani selaku Ketua FPRB Desa Srimartani menyampaikan melalui wawancara mengenai target FPRB dan kegiatan destana ke depan. Beberapa hal yang menjadi target adalah :

- 1) Sektor di FPRB dapat berjalan secara maksimal. Jadi, ketika ada kejadian bencana di Desa Srimartani secara otomatis sistemnya berjalan dengan cara setiap sektor langsung melaksanakan tugasnya.
- 2) Desa Srimartani memiliki peta yang detail yang berada di setiap dusun. Peta tersebut memberkan informasi yang detail mengenai beberapa hal yaitu: potensi ancaman yang terdapat di dusun tersebut; jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan rentan usia; lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi; tokoh di dusun tersebut yang dapat

dilibatkan; serta jumlah kendaraan yang dapat digunakan untuk ambulan desa.

- 3) Terdapat sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Apabila swasta atau dunia usaha mengambil peran dalam pengurangan risiko bencana anggaran program destana tidak harus bergantung kepada pemerintah. Sehingga sinergitas antara ketiganya akan mendorong desa mencapai kemandirian.

Tiga hal tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai FPRB dalam beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2019 FPRB Srimartani memiliki rencana untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas tetapi untuk detail jenis kegiatan dan waktu pelaksanaan belum ditetapkan. Kegiatan yang sudah berjalan saat ini adalah pemberdayaan bersama UMY dan MDMC untuk membuat rencana kontinjensi multi hazard.

d. Komitmen masyarakat dalam kelanjutan program destana

Komitmen masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program desa tangguh bencana dapat diukur dari keikutsertaan masyarakat menjadi relawan FPRB dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan destana. Pada pelaksanaan program destana tahun 2017 dan 2018 lalu masyarakat Desa Srimartani selalu aktif mengikuti kegiatan destana mulai dari sosialisasi, simulasi, dan tanggap darurat. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Dusun Tambalan, Kemloko,

Umbulsari, dan Bulusari, masyarakat akan berpartisipasi dalam kegiatan destana karena merasa butuh. Sedangkan saat ditanya mengenai kebersediaan bergabung dengan relawan FPRB beberapa menyampaikan alasan tidak dapat bergabung karena kendala usia yang sudah tua dan terkendala waktu.

Pada indikator *product* ini dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan desa tangguh bencana di Desa Srimartani tahun 2017 dan 2018 telah menunjukkan hasil, walaupun masih terdapat beberapa aspek yang perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Kegiatan peningkatan kapasitas untuk masyarakat dan relawan telah terlaksanan yang berdampak terhadap meningkatnya ketangguhan atau ketahanan masyarakat. Masyarakat Desa Srimartani saat ini telah mampu melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana seperti memotong dahan pohon yang rawan terkena angin kencang dan menutup rekahan tanah menggunakan terpal untuk meminimalkan longsor. Selain itu masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tanggap darurat. Belum optimalnya indikator *product* ini terletak pada belum terlaksannya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat diseluruh dusun di Desa Srimartani, dari total enam dusun yang berada pada zona merah longsor baru 3 dusun yang mendapatkan edukasi dari FPRB Srimartani. Selain itu rambu-rambu untuk jalur evakuasi dan titik kumpul belum terpasang di seluruh dusun di Desa Srimartani.